

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENERAPAN APLIKASI DIGITAL LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN (SI DILAN) PADA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA) KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

SKRIPSI



FAIRUS WAFIQ ANJELICA

NIM : 11970523462

UIN SUSKA RIAU

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2023

**PENERAPAN APLIKASI DIGITAL LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN (SI DILAN) PADA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA) KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu
Sosial (S.Sos) Pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan
Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



FAIRUS WAFIQ ANJELICA

NIM : 11970523462

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Fairus Wafiq Anjelica
NIM : 11970523462
Jurusan : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Judul Skripsi : Penerapan Aplikasi Digital Laporan Pertanggungjawaban
Keuangan (SI DILAN) pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Indragiri
Hulu
Tanggal Ujian : Jumat, 16 Juni 2023

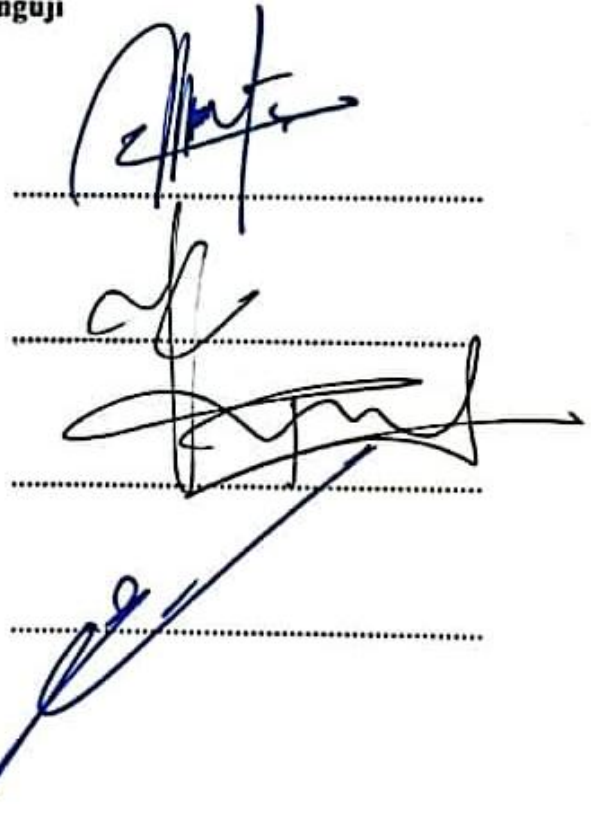
Tim Penguji

Ketua Penguji
Dr. Jon Afrizal, S. HI, MA
NIP. 19790911 201101 1 003

Penguji I
Afrizal, S. Sos, M.Si
NIP. 19690419 200701 1 025

Penguji II
Rony Jaya, S. Sos, M.Si
NIK. 130 717 060

Sekretaris Penguji
Ermansyah, SE, MM
NIK. 130 712 070



The image shows four handwritten signatures in blue ink, each positioned above a horizontal dotted line. The signatures are: 1. A stylized signature for the Chairman (Dr. Jon Afrizal). 2. A signature for Examiner I (Afrizal). 3. A signature for Examiner II (Rony Jaya). 4. A signature for the Secretary (Ermansyah).

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

NAMA : FAIRUS WAFIQ ANJELICA
NIM : 11970523462
PROGRAM STUDI : SI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
SEMESTER : VIII (DELAPAN)
JUDUL : PENERAPAN SI DILAN PADA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN INDRAGIRI
HULU

DISETUJUI OLEH:**PEMBIMBING**

Dr. KHAIRUNSYAH PURBA, S.Sos M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002

MENGETAHUI:

WAKIL DEKAN 1
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

Dr. KAMARUDDIN, S.Sos, M.Si
NIP. 19790101 200710 1 003

KETUA PRODI
SI ADMINSTRASI NEGARA

Dr. KHAIRUNSYAH PURBA, S.Sos M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fairus Wafiq Anjeica

NIM : 11970523462

Tempat/Tgl. Lahir : Indragiri Hulu / 26 Juli 2000

Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Prodi : Administrasi Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Peranan Si-Dian (Aplikasi Digital Layanan Pertambangan dan
keuangan) Pada Badan Pertambangan Nasional Daerah (BAPPEDA)
Kabupaten Indragiri Hulu

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekantiman, 12 Juni 2023.
 it pernyataan

 Fairus Wafiq Anjeica
 NIM : 11970523462

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah *rabbi alamin*, dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah *Subhana wa ta'ala*, yang memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga skripsi yang berjudul “**PENERAPAN APLIKASI DIGITAL LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN (SIDILAN) PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN INDRAGIRI HULU**” Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos) Pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pada kesempatan yang baik ini, tidak lupa penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya baik secara langsung maupun tidak langsung atas segala dukungan, bantuan, bimbingan, pengarahan nasehat dan pemikiran dari berbagai pihak selama proses studi dan juga selama proses pembuatan skripsi ini. Terimakasih kepada Kedua orang tua tercinta Ayahanda Faisallahuddin dan Ibunda Patmawati, S.Pd yang selalu memberikan doa dan dukungan yang luar biasa kepada penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M. Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara serta sekaligus Dosen Pembimbing Penelitian ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Dr. Mashuri, S.HI, MA. Selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara.
5. Sahabat perjuangan yang selalu menyemangati dalam susah maupun senang : Nona Cantika, Salsabila Umi Nurul Agung, Friska Alifia, dan Lina Anggraini.
6. Teman-teman se-angkatan 2019 Jurusan Administrasi Negara yang senantiasa berjuang bersama dalam perkuliahan.

Pekanbaru, Juni 2023

Penulis,

FAIRUS WAFIQ ANJELICA

NIM : 11970523462

UIN SUSKA RIAU


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

**Penerapan Aplikasi Digital Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
(SI DILAN) Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
Kabupaten Indragiri Hulu**

Oleh:

**Fairus Wafiq Anjelica
11970523462**

Penelitian ini bertujuan mempelajari penerapan SI DILAN (Aplikasi Digital Laporan Pertanggungjawaban Keuangan) Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Indragiri Hulu. SI DILAN merupakan salah satu E-Government yang diterapkan pada lingkup pemerintahan daerah yaitu dalam hal menunjang pengelolaan laporan keuangan berfokus bagi pegawai. Sebelumnya, laporan keuangan diarsipkan secara manual yang mengakibatkan banyak memakan ruang atau tempat. Pencarian data menjadi tidak efisien dan efektif, sehingga kinerja pegawai menjadi lambat dan terhambat. SI DILAN membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu wawancara bersama pengguna aplikasi, selanjutnya dilakukan observasi. Adapun indikator antara lain infrastruktur telekomunikasi, Sumber Daya Manusia (SDM), ketersediaan dana dan anggaran, perangkat hukum, dan penyesuaian paradigma. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa SI DILAN berperan sangat penting dalam membantu pengelolaan keuangan dan pengarsipan data sehingga arsip yang menumpuk dan memakan ruang dapat teratasi. Akan tetapi, berdasarkan data juga yang diperoleh permasalahan jaringan, pemahaman hukum, dan sanksi keterlambatan perlu menjadi atensi yang harus segera diperbaiki.

Kata Kunci : BAPPEDA, *E-Government*, Keuangan, SI DILAN.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Application on Digital Application of Financial Accountability Report (SI DILAN) at the Regional Development Planning Agency (BAPPEDA) of Indragiri Hulu Regency

By :

Fairus Wafiq Anjelica
11970523462

This study aims to study the application of SI DILAN (Digital Financial Accountability Report Application) at the Regional Development Planning Agency (BAPPEDA) of Indragiri Hulu Regency. SI DILAN is one of the E-Governments that is applied to the scope of regional government, namely in terms of supporting the management of financial reports for employees. Previously, financial reports were archived manually which resulted in taking up a lot of space. Searching for data becomes inefficient and ineffective, so that employee performance becomes slow and hampered. SI DILAN helps solve these problems with application-based management that can be accessed via a computer or smartphone. This research focuses on studies related to the application of these applications using a qualitative descriptive research type. It aims to present research that is in accordance with the actual reality in the field. The method used to collect data is interviews with application users, then observations are made. The indicators that are used as a reference include telecommunications infrastructure, Human Resources (HR), availability of funds and budgets, legal instruments, and paradigm adjustments. The results of this study explain that SI DILAN plays a very important role in assisting financial management and data archiving so that archives that accumulate and take up space can be resolved.

Keywords : BAPPEDA, E-Government, Financial, SI DILAN.

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Inovasi	9
2.2 <i>E-Government</i>	14
2.3 SI DILAN	21
2.4 Definisi Konsep	29
2.5 Konsep Operasional.....	29
2.6 Kerangka Pemikiran	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian.....	33
3.2 Jenis Penelitian	33
3.3 Sumber Data Penelitian	34
3.4 Teknik Pengumpulan Data	35
3.5 Teknik Analisis Data	36
BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	38
4.1 Sejarah Kabupaten Indragiri Hulu	38
4.2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Indragiri Hulu	40

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3	Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu	41
4.2	Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu	43
4.3	Struktur BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hulu.....	48
4.4	Penggunaan SI DILAN.....	49
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		51
5.1	Infrastruktur Telekomunikasi	54
5.2	Sumber Daya Manusia (SDM)	57
5.3	Ketersediaan Dana dan Anggaran	64
5.4	Perangkat Hukum	67
5.2	Penyesuaian Paradigma	69
BAB VI PENUTUP		72
6.1	Kesimpulan.....	72
6.2	Saran	74
DAFTAR PUSTAKA		75



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

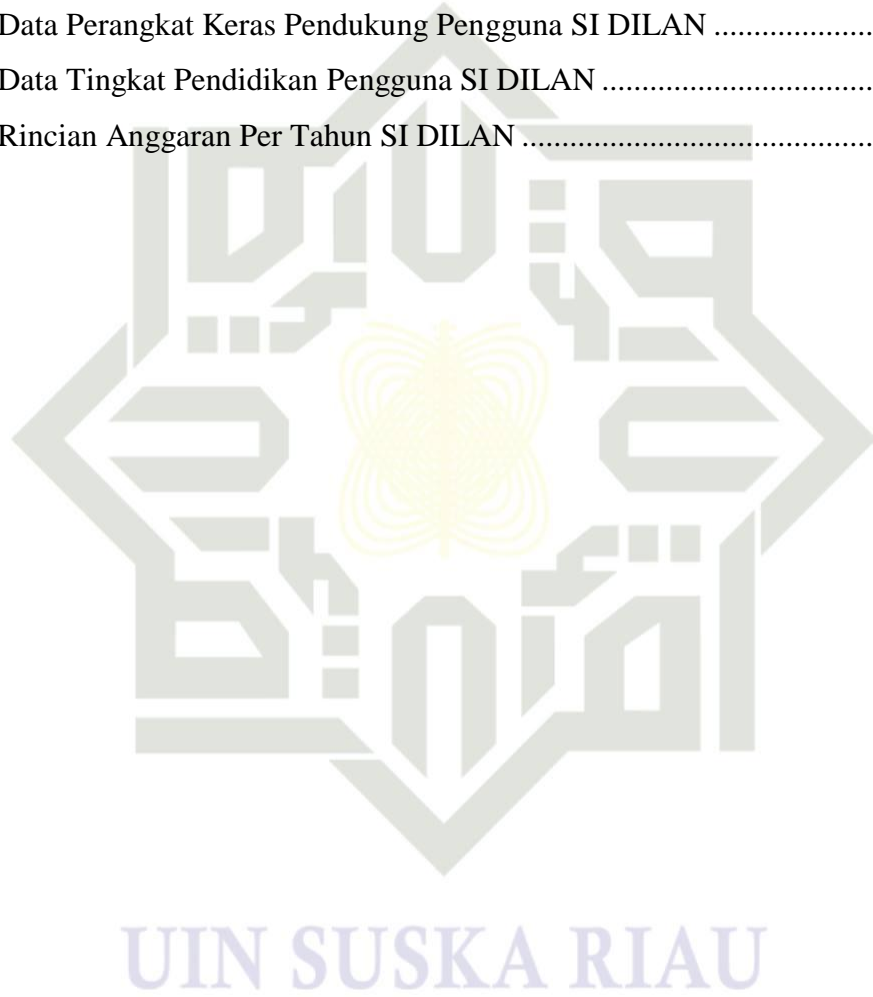
DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Penumpukkan Arsip Lpj Keuangan.....	4
Gambar 2.1 Peluncuran SI DILAN (Arsip BAPPEDA).....	21
Gambar 2.2 Tampilan SI DILAN melalui perangkat komputer	22
Gambar 2.3 Undangan Penggunaan Aplikasi Dikirim Melalui Email yang Telah Didaftarkan.....	24
Gambar 2.4 Tampilan Menu Utama SI DILAN	24
Gambar 2.5 Pilihan Nama Kegiatan yang Datanya Ingin Dimasukkan	25
Gambar 2.6 Tampilan Tempat Penyimpanan Data	25
Gambar 2.7 Tampilan Halaman Hasil Entri	26
Gambar 2.8 Tampilan Awal Aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah).....	28
Gambar 2.9 Kerangka Pemikiran Penelitian	32
Gambar 4.1 Kantor BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hulu.....	33
Gambar 4.2 Bagan Struktur BAPPEDA Indragiri Hulu.....	37
Gambar 4.3 Kerangka Berpikir SI DILAN	50
Gambar 5.1 <i>Flowchart</i> Penerapan SI DILAN	60
Gambar 5.2 Rekapan Penggunaan SI DILAN.....	63

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Struktur Tim Pengelola Aplikasi.....	23
Tabel 2.2 Konsep Operasional SI DILAN	30
Tabel 3.1 Jadwal Pelaksanaan Penelitian	33
Tabel 5.1 Data Perangkat Keras Pendukung Pengguna SI DILAN	55
Tabel 5.2 Data Tingkat Pendidikan Pengguna SI DILAN	58
Tabel 5.3 Rincian Anggaran Per Tahun SI DILAN	65



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transformasi teknologi dan informasi di dunia telah menunjukkan perubahan yang signifikan. Transformasi yang dimaksud yaitu digitalisasi, yang begitu banyak memberikan kemudahan dalam menjalankan pekerjaan-pekerjaan manusia dari segala aspek maupun bidang. Teknologi informasi yang kian canggih dapat dilihat dari beberapa teknologi telah yang ada, misalnya teknologi finansial (*fintech*), keuangan digital, promosi barang/ jasa, perdagangan, perkantoran, pendidikan dan sebagainya (Hoetoro dan Satria, 2020). Jarak dan waktu tidak menjadi halangan yang berarti lagi untuk mewujudkan efisiensi dalam segala bidang pembangunan yang ada.

Perkembangan teknologi yang ada telah mempengaruhi semua aspek, bisa menjadi baik maupun sebaliknya sehingga bisa diibaratkan sebagai dua mata pisau. Kondisi tersebut seharusnya menjadi atensi pihak-pihak yang ada, sehingga sikap bijaksana dalam mengelola dan menggunakan teknologi akan tumbuh (Nurkholis *et al*, 2017). Semua bidang dalam bermasyarakat dan bernegara ketika melibatkan digitalisasi, memiliki sisi positif dan juga sisi negatif. Hal ini jika tidak dikontrol dan diawasi akan menimbulkan dampak-dampak yang tidak diinginkan, misalnya penyalahgunaan wewenang dan menurunnya sikap profesionalitas dalam bekerja. Maka dari itu, digitalisasi dari segala aspek bidang kehidupan juga harus dipagari dengan pengawasan yang baik, hal ini bertujuan agar efektif dan efisien yang diinginkan tercapai.

Sistem pemerintah yang dinamis mendorong terjadinya implementasi penggunaan teknologi dan informasi pada tata kelola pemerintahan. Penggunaan sistem informasi dan teknologi tersebut berguna dalam meningkatkan transparansi, produktifitas, dan efektivitas. Selain itu, penggunaan teknologi juga dapat merepresentasikan inovasi tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut Said (2007), inovasi dapat mempengaruhi pertumbuhan dan kemajuan suatu organisasi baik organisasi sektor publik seperti instansi pemerintahan maupun swasta. Organisasi-organisasi tersebut mencari inovasi untuk memenuhi kebutuhan warga yang semakin kompleks dan perkembangan zaman. Salah satu inovasi teknologi dan informasi yang diterapkan akhir-akhir ini pada sektor pemerintahan adalah *E-Government*.

E-Government (Electronic Government) atau juga disingkat *E-Gov*, merupakan salah satu bentuk perwujudan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan berbasis sistem informasi. Penerapan teknologi ini juga merupakan salah satu upaya perwujudan *Good Governance* (tata kelola yang baik) dalam hal pelayanan masyarakat dan membantu tenaga pendukung suatu instansi. Penerapan sistem seperti ini dapat membantu dalam pemantauan kinerja berbasis sistem aplikasi atau web. Kinerja pegawai dapat dioptimalkan melalui pemantauan integritas, sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang dinamis, bersih, dan baik (Wahyuni, 2020).

Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika (2020) dalam *website* resmi mengatakan bahwa Indonesia dalam pengelolaan *E-Government* berada pada peringkat ke-5 terbaik di Asia Tenggara tahun 2022. *United Nations* atau Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam sebuah laporan berjudul "*E-Government*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Survey 2022”, Indonesia mendapatkan penilaian sebesar 0,7160 poin dari 1 poin EGDI (nilai pengembangan *E-Government*) dan peringkat ke-77 di seluruh dunia. Reformasi Indonesia melahirkan tuntutan akan pelayanan pemerintahan yang lebih baik, sehingga menimbulkan kampanye *Clean and Good Governance* yaitu upaya menciptakan kehidupan yang beradab dan berorientasi pada digitalisasi (Farida *et al*, 2020). Panduan kebijakan harus terarah pada sistem anggaran dan dana, terkhusus dalam hal akuntabilitas dan transparansi publik sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik melalui penerapan *E-Government* (Dwiyanto, 2018). Selain itu, Menurut Indrajit (2016), penerapan tersebut juga mampu mengoptimalkan pelayanan pemerintah dalam hal kinerja, meningkatkan akuntabilitas, efektifitas administrasi, serta membuat masyarakat berkembang dalam hal teknologi. Salah satu institusi pemerintahan yang menerapkan hal tersebut adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau.

BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hulu sebagai perangkat daerah memiliki tugas dan fungsi mengkoordinasikan, mensinergikan, dan mengharmonisasikan perencanaan dan pengelolaan pembangunan daerah ke dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Penggunaan sistem informasi berbasis aplikasi pada Kantor BAPPEDA Indragiri Hulu didasari pada belum berjalannya secara ideal dan efektif dalam pengelolaan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Pengelolaan laporan tersebut belum diarsipkan secara *mechanized* serta penyusunan arsip verifikasi laporan tersebut juga masih dilakukan secara manual. Hal tersebutlah yang menyebabkan sistem informasi keuangan menjadi tidak lancar dan efisien, dikarenakan *hardcopy* arsip memerlukan akses secara manual, terlebih lagi data-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data pada periode yang cukup lama. Dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi dan optimalisasi penyelenggaraan penatausahaan keuangan pada Kantor BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hulu, maka diterapkan sebuah *E-Government* berbasis aplikasi bernama SI-DILAN (Aplikasi Digital Laporan Pertanggungjawaban Keuangan) (Rozadin,2021).



Gambar 1.1 Penumpukkan arsip LPJ keuangan.

SI DILAN memberikan solusi dalam mengoptimalkan pengelolaan laporan pertanggungjawaban bendahara. Adapun aspek-aspek yang dioptimalkan antara lain belum adanya media pengelola laporan pertanggungjawaban bendahara, pelaporan aset Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum optimal, penyusunan laporan keuangan belum efisien dan tepat waktu, rendahnya tingkat kepedulian Aparatur Sipil Negara (ASN), lemahnya ketegasan Pejabat Pengelola Keuangan (PPK) di perangkat daerah, serta regulasi (Rozadin, 2021). *E-Government* akan menjadi upaya perbaikan aspek-aspek yang belum optimal di institusi pemerintahan daerah terkhususnya, BAPPEDA Indragiri Hulu.

BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hulu masih memiliki beberapa kendala di lingkup instansi maupun sistem dalam penerapan *E-Government* SI-DILAN. Salah satu kendala yang masih terjadi dalam pelaksanaan SI-DILAN adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

server penyimpanan *online* dan terbatas. Penyimpanan terbatas tersebut dikarenakan sistem server SI-DILAN masih menggunakan *server online* yang tersedia. Oleh karena itu, data-data laporan pertanggungjawaban harus disalin (*back up*) secara manual ke komputer admin utama *server online*. Selain itu, pelaksanaan sistem yang berbasis *online* dinilai masih rawan dalam hal tingkat sekuritas atau keamanannya. Konfirmasi penggunaan melewati persetujuan admin utama dinilai masih kurang, dikarenakan konfirmasi untuk *e-mail* tersebut hanya dilakukan sekali pada awal penggunaan saja (Rozadin,2021).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Juliarso (2019) tentang implementasi *E-Government* di Kabupaten Ciamis menjelaskan bahwa adanya kemajuan penerapan digitalisasi pemerintahan menggunakan perangkat lunak aplikasi berbasis web. Akan tetapi, sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan dan mengelola aplikasi masih menjadi kendala yang menghambat. Selanjutnya berdasarkan Yayuk Basuki dalam penelitian Ramadhan (2020) mengenai inovasi *E-Government* Si-Cakep di Kabupaten Wajo, menerangkan bahwa adanya penerapan digitalisasi tersebut membantu memberikan penyediaan pelayanan yang baik. Peningkatan keahlian pegawai, pemahaman administratif yang mendalam, dan kebijakan baru yang efektif merupakan dampak yang diberikan pelayanan berbasis digitalisasi tersebut. Selain itu, kegiatan pelayanan publik dan kinerja kepegawaian menjadi terukur sehingga tingkat kepuasan pelayanan meningkat. Merujuk Penelitian dari Rahmah dan Ranu (2015) tentang penerapan *E-Office* di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya, menjelaskan bahwa penggunaan *E-Office (E-Government)* belum secara maksimal dikatakan efektif karena terbatasnya Sumber Daya Manusia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SDM) yang mampu mengelola. Maka dari itu diperlukan sosialisasi yang lebih maksimal agar E-Office tidak hanya dimengerti oleh pihak pimpinan dan petinggi instansi, melainkan aparatur yang terlibat juga dapat memahami. Selain itu, faktor-faktor lain juga harus diperhatikan seperti infrastruktur dan lain sebagainya sehingga pelaksanaan di pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Penelitian-penelitian terdahulu tersebut memberikan gambaran bahwasanya masih banyak tantangan dalam meneraplan sistem dan pelayanan pemerintahan berbasis teknologi. Permasalahan dan tantangan tersebut berasal dari banyak faktor-faktor yang saling mempengaruhi satu sama lain. Berdasarkan hal tersebut, mendasari penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti pelaksanaan *E-Government* (SIDILAN), dengan judul penelitian mengenai “Penerapan Aplikasi Digital Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SI DILAN) Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Indragiri Hulu”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan yang diteliti dan dianalisis pada penelitian ini adalah “Bagaimana penerapan SI DILAN pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Indragiri Hulu”?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pelaksanaan dan penerapan *E-Government* SI-DILAN dalam menunjang pengelolaan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Indragiri Hulu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut.

- 1) Menjadikan proses verifikasi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bendahara lebih efektif dan efisien.
- 2) Mempermudah pengawasan pengoptimalan anggaran Bagi Pejabat Pengelola Keuangan (PPK).
- 3) Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan ataupun gagasan dalam inovasi yang efektif dalam penyelesaian permasalahan pada penyelenggaraan pemerintahan.
- 4) Bagi penulis, penelitian ini membantu penulis untuk mengembangkan keahlian dalam menuangkan kajian permasalahan yang ada dalam bentuk karya tulis ilmiah

1.5 Sistematika Penulisan

Gambaran secara umum pada penelitian ini terbagi dalam enam bab penjelasan sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjabaran dan penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, serta juga sistematika penulisan pada penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penjelasan teori yang melandasi penelitian sebagai acuan dalam hal analisis dan kerangka pemikiran untuk menyelesaikan rumusan masalah yang terjadi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- BAB III : METODE PENELITIAN**
Bab ini berisi jawaban penyelesaian masalah dalam penelitian dengan penjabaran jenis, metode, dan analisis mengolah data.
- BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**
Bab ini memaparkan sejarah dan letak geografis Kabupaten Indragiri Hulu, visi & misi, tugas pokok & fungsi, struktur BAPPEDA Indragiri Hulu, serta kerangka berpikir SI DILAN.
- BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**
Bab ini memaparkan data dan menjelaskan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai penerapan SI DILAN pada BAPPEDA Indragiri Hulu serta analisisnya berkaitan dengan beberapa indikator yang mempengaruhi.
- BAB VI : PENUTUP**
Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan penelitian yang telah dilakukan serta saran dan masukan bagi pengembangan dan pengelolaan SI DILAN yang baik kedepannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Inovasi

Pada Era Society 5.0, inovasi sangat diperlukan dalam mengembangkan pembaharuan-pembaharuan guna menyesuaikan perkembangan zaman yang dinamis. Hal ini tentunya sangat berguna dalam membantu dan meringankan pekerjaan-pekerjaan yang ada. Selain itu dengan adanya inovasi akan melahirkan begitu banyak pemikiran-pemikiran berupa kreativitas setiap orang, dimana yang bertujuan untuk saling bermanfaat satu sama lain.

Menurut Gupta (2007), kreativitas menjadi syarat yang penting dalam penyesuaian dan peralihan tersebut termasuk dalam sebuah institusi maupun organisasi. Kreativitas berupa gagasan baru akan melahirkan sebuah inovasi, dimana kemampuan berpikir kreatif tentunya sangat diperlukan dalam membangun dan mencapai suatu tujuan. Inovasi tidak akan bisa berjalan sendiri tanpa adanya kreativitas, karena inovasi dan kreativitas merupakan suatu yang tidak terpisahkan dan saling melengkapi (Stamm, 2008). Menurut Trott (2008), inovasi menjadi pusat dalam hal membangun organisasi dikarenakan berperan sangat penting pada keberlanjutan pengembangan perusahaan. Selain itu, pembentukan dan pengembangan ide (inovasi) diperlukan terutama dalam proses pembuatan dan pemasaran produk perusahaan.

Menurut (Anatan *et al*, 2009), secara singkat pembentukan dan pengembangan inovasi sangat diperlukan untuk masa depan sebuah organisasi. Beberapa tahapan-tahapan yang dilalui dalam membuat inovasi antara lain mencari, merumuskan, memutuskan, dan selanjutnya mencoba. Secara umum, inovasi

bertujuan untuk menghadirkan pembaharuan dan pemecahan masalah yang ada, guna terwujudnya perkembangan yang signifikan dan target yang tercapai.

Menurut Makmur dan Thahier (2015), ada empat sisi pandang (perspektif) dalam tujuan inovasi yaitu antara lain sebagai berikut.

- a) Finansial, yaitu dalam melahirkan sebuah inovasi diperlukan anggaran yang diharapkan dengan pembiayaan yang relatif sedikit dapat membuat inovasi yang banyak (optimal).
- b) *Customer*, inovasi yang baik harus dapat memberikan pelanggan pelayanan yang baik, dimana hal ini harus dilakukan pada setiap lapisan yang ada di perusahaan.
- c) *Business* internal, suasana internal yang kondusif pada suatu perusahaan harus mampu diciptakan oleh setiap lapisan perusahaan.
- d) Pengembangan, hal ini diperlukan untuk mendukung pertumbuhan bidang usaha perusahaan.

Tipe-tipe inovasi mencakup beberapa hal yaitu layanan baru, *supply chain*, *delivery*, serta *marketing* dengan perangkat. Penambahan *design* dan promo yang menarik, dan sebagainya juga mampu menjadi faktor pendukung pertumbuhan usaha yang tentunya memanfaatkan digitalisasi teknologi (Susanto dan Putra, 2010). Inovasi memiliki beberapa prinsip dalam pelaksanaannya yaitu antara lain sebagai berikut (Kuratko dan Hodgetts, 2007).

- a) Berorientasi pada aksi, aktif dalam melahirkan ide-ide pembaharuan adalah keharusan inovator.
- b) *Making product*, dapat membuat pemahaman sederhana tentang bagaimana memproduksi sesuatu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Bertahap dari hal kecil, inovator harus mampu berpikir bertahap dalam memulai sebuah pembaharuan. Hal tersebut tentunya dimulai dari elemen kecil hingga bisa dibangun, dikembangkan, dan dilaksanakan dengan cara yang tepat.
- d) Target, memiliki tujuan yang jelas kedepannya guna mencapai kesuksesan serta mendapat pengakuan dari lingkungan sekitar.
- e) *Try/test/revise*, inovator harus paham alur dalam mengembangkan inovasi antara lain melakukan percobaan pengujian dan juga perbaikan setelah pelaksanaan. Hal ini sangat membantu dalam segi mengetahui kekurangan maupun kelemahan produk.
- f) Evaluasi, tekad untuk terus belajar sangat diperlukan guna untuk membangun dan mempertahankan sebuah perusahaan.

Menurut Abernathy, Clark, dan Tidd yang dikutip dalam Stamm (2008),

ada empat macam-macam inovasi, antara lain sebagai berikut.

a) *Architectural Innovation*

Dalam membangun inovasi, diperlukan perencanaan ataupun pembentukan dasar yang terdiri dari pembuatan produk, pelaksanaan, teknis lapangan, serta pemasaran kepada konsumen.

b) *Market Niche Innovation*

Inovasi memiliki peluang besar dalam menciptakan pasar baru melalui teknologi, dimana hal tersebut dapat mempengaruhi dan berdampak pada sistem produksi serta mampu memperkuat pasar tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



c) *Regular Innovation*

Perubahan yang regular meliputi kemampuan dalam hal produksi dan teknis guna diberikan kepada pelanggan dilibatkan dalam inovasi pada perusahaan. Hal ini bertujuan untuk mengelola dan menjaga sumber daya yang terampil.

d) *Revolutionary Innovation*

Perusahaan harus mampu mengikuti dan menyesuaikan perkembangan pelanggan dalam hal teknis maupun produksi.

Salah satu tolak ukur kehidupan manusia adalah kuantitas atau seberapa banyak kebermanfaatan yang mampu diciptakan oleh individu tersebut. Kebermanfaatan dalam konteks ini tentunya dalam hal kebaikan, keberkahan, kemaslahatan umat, dan juga kemajuan kaum maupun negara. Sesuai dengan hadist Rasulullah *shalallahu 'alahi wasallam* dalam dalam Kitab Musnad Asy-Syihab Karya Imam Al-Qudha'I, yang berbunyi sebagai berikut.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عُمَرَ الصَّفَّارِ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ زِيَادٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيِّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَهْرَامٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي كَرِيمَةَ عَنْ بِنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمُؤْمِنُ إِلْفٌ مَأْلُوفٌ وَلَا خَيْرَ فِي مَنْ لَا يَأْلَفُ وَخَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad, Abdurrahman bin Umar As-Shaffar telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad bin Ziyad telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdillah Al-Hadhrami telah menceritakan kepada kami Ali bin Bahram telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin Abi Karimah dari Ibnu Juraij dari Atho” dari Jabir ia berkata bahwa Rasulullah SAW. bersabda: “Orang mukmin adalah sahabat dan tidak ada baiknya dalam diri orang yang tidak bisa bersahabat dan sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling bermanfaat bagi manusia.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, Allah *subhana wa ta'ala*. dalam ayat Al-Qur'an juga senantiasa mendorong perubahan yang baik dengan ketentuan hamba-hambanya mau berubah dan menciptakan sesuatu yang baik (inovasi) pula. Allah *ta'ala* berfirman dalam Surah Ar-Rad : Ayat 11 sebagai berikut.

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

“*Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.*” (Surah Ar-Rad:11)

Sayyid Qutb dalam tafsir *Fi Zilalil Qur'an*, menerangkan malaikat-malaikat penjaga diperintahkan oleh Allah *ta'ala*, untuk mengawasi apa yang dilakukan dan diperbuat manusia. Dalam hal ini, Allah *ta'ala* mengikuti melalui perintah tersebut untuk dapat mengubah kondisi atau keadaan mereka. Hal ini dikarenakan Allah *ta'ala* tidak akan mengubah kemuliaan atau kerendahan, kedudukan, nikmat atau bencana, maupun kehinaan, kecuali jika orang-orang tersebut mau mengubah perbuatan, perasaan, dan kenyataan hidup mereka. Oleh karena hal itu, Allah *ta'ala* mengetahui perubahan yang terjadi pada diri mereka sehingga akan mengubah keadaan diri mereka sesuai dengan hal tersebut. Walaupun Allah *ta'ala* mengetahui apa yang akan terjadi pada diri mereka tersebut merupakan akibat dari apa yang diperbuat oleh mereka, hal ini berbanding lurus dengan perubahan yang terjadi. Perubahan yang baik akan melahirkan kemaslahatan yang baik pula, serta dapat dirasakan oleh banyak manusia. Oleh karena hal itu Inovasi seperti *E-Government* harus dapat juga seperti itu.

Menurut Sinurat dan Sumanti (2020), Inovasi menjadi faktor yang terpenting dalam menstimulus kemakmuran daerah serta daya saing pengelolaan daerah. Di lingkup pemerintahan daerah terdiri dari tata kelola pemerintahan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tata kelola pelayanan publik. Dimana dalam menerapkannya akan mendapatkan tantangan dari dalam maupun luar instansi. Adapun faktor internal tersebut antara lain kepemimpinan, sumber daya manusia, anggaran, dan budaya organisasi, sementara faktor eksternal yaitu partisipasi dan dukungan dari masyarakat.

2.2 E-Government

E-Government atau kepanjangan dari *Electronic Government* adalah inovasi berbasis teknologi informasi dalam tata kelola organisasi ataupun pemerintahan. Menurut Indrajit (2016), *E-Government* adalah pemanfaatan teknologi berbasis informasi oleh pemerintah dalam mengelola transformasi hubungan dengan masyarakat, *stake holder*, maupun dunia bisnis. Sedangkan menurut Widodo (2016), penyelenggaraan pemerintahan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi guna meningkatkan kinerja, serta akuntabilitas dan transparansi informasi kepada masyarakat guna terciptanya *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik). Peningkatan hubungan yang baik antara pemerintah dengan pihak lain bisa diciptakan melalui pemanfaatan teknologi informasi (Setiawan, 2016). Pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah sangat membantu dalam mengembangkan pelayanan publik, yaitu memfasilitasi dan mewujudkan efisiensi akses publik dalam informasi oleh masyarakat, didefinisikan sebagai perwujudan *E-Government* dalam sebuah institusi (Aritonang, 2017). Selain itu, penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah tersebut juga dapat diperuntukkan pada keperluan bisnis maupun hal-hal lain seperti urusan pengembangan dan pengelolaan pemerintahan (Subekti dkk, 2017).

Di Indonesia, *E-Government* menjadi sebuah kegiatan atau penyelenggaraan guna mendorong dan memfasilitasi hubungan yang saling

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersinergi antara masyarakat, pemerintah maupun dunia bisnis melalui penggunaan teknologi dalam informasi dan komunikasi (Valle-Cruz, 2019).

Good Governance dapat dilaksanakan dengan meningkatkan pelayanan publik yang optimal membutuhkan pengembangan *E-Government*, serta kebijakan mendukung strategi akan hal tersebut. Kebijakan tersebut diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan secara menyeluruh pada semua lapisan pemerintahan.

Oleh karena hal tersebut, sosialisasi dan edukasi implementasi *E-Government* perlu dilaksanakan dengan konsisten, berkelanjutan, dan inisiatif kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan masih banyak yang belum mengetahui dan memahami mengenai penerapan *E-Government* serta manfaat yang bisa dirasakan (Aritonang, 2017). Dari beberapa definisi ahli tersebut, dapat disimpulkan *E-Government* ialah penerapan teknologi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan ataupun institusi yang baik agar efisien, efektif, serta produktif guna terciptanya pelayanan masyarakat yang baik. Latar belakang yang mendasari berkembangnya *E-Government* yaitu antara lain (Indrajit, 2016).

- a) Perkembangan dan mobilisasi informasi yang begitu dinamis, menjadikan aspek-aspek seperti Hak Asasi Manusia (HAM), demokratis, transparansi akan hukum, perdagangan bebas, korupsi, maupun pasar terbuka menjadi perhatian utama yang harus dipikirkan semua pihak, agar tidak dikecualikan dari kemajuan yang ada.
- b) Media komputer dan telekomunikasi berkembang dengan sangat pesat, sehingga menyebabkan data (informasi) dan pengetahuan tersebar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan dinamis, serta mampu dengan cepat disebarluaskan ke seluruh elemen masyarakat di belahan dunia manapun.

- c) Perkembangan industri sangat berperan dalam hal peningkatan kualitas kehidupan masyarakat terkhusus kegiatan ekonomi. Pendekatan antara pelaku ekonomi dan masyarakat seperti pedagang, perusahaan, maupun investor dapat menyebabkan adanya suatu jasa yang telah berkembang.

Adanya penerapan teknologi digitalisasi pemerintahan tersebut tidak terlepas dari adanya tuntutan masyarakat Indonesia yang berbeda namun saling berkaitan erat, yaitu sebagai berikut (Sosiawan, 2008).

- a) Pelayanan publik dalam memenuhi kepentingan masyarakat luas di seluruh wilayah Indonesia yang dituntut dapat dijangkau secara interaktif, terpercaya, dan dapat diandalkan.
- b) Aspirasi masyarakat yang menginginkan di dengar pemerintah, sehingga pemerintah dituntut dapat menyediakan sarana yang menampung pendapat ataupun keinginan diskusi terhadap perumusan peraturan ataupun kebijakan yang ada.

Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2003 menjelaskan bahwa *E-Government* yang diterapkan pada setiap instansi pemerintahan harus berpedoman kepada tahapan pengembangan dan pengelolaan secara nasional, dengan penyesuaian terhadap keadaan dan kondisi masing-masing instansi pemerintahan. Adapun cakupan pengembangan *E-Government* tersebut antara lain infrastruktur telekomunikasi yang ada, kondisi pelayanan, sumber daya manusia yang mengelola, dan anggaran yang dibutuhkan. Selain itu, beberapa praktisi dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbagai negara menjelaskan ada tiga tantangan utama terbesar pemerintah maupun masyarakat yang akan dihadapi dalam menyelenggarakan konsep E-Government di masing-masing negaranya, antara lain sebagai berikut (Indrajit, 2016).

- a) Tantangan dalam menentukan dan menciptakan penyediaan akses digital dan elektronika secara efektif yang akan digunakan oleh pemerintah dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
- b) Tantangan dalam melibatkan lembaga eksternal pemerintahan baik non komersil maupun swasta yang membantu mengembangkan infrastruktur yang dibutuhkan.
- c) Tantangan dalam menyusun strategi permasalahan biaya operasional dan investasi yang mendukung sehingga manajemen pemerintahan berbasis digitalisasi tersebut berjalan lancar dan sesuai dengan harapan.

Tantangan-tantangan yang ada tersebut, sebanding dengan manfaat-manfaat yang signifikan dirasakan nanti. Menurut Indrajit (2016), penerapan *E-Government* memiliki beberapa manfaat sebagai berikut.

- a) Mengoptimalkan kinerja pemerintah terhadap elemen-elemen pendukung dalam hal melayani.
- b) Meningkatkan akuntabilitas,
- c) Menekan anggaran administrasi pada relasi dalam interaksi,
- d) Membuat masyarakat *up to date* terhadap lingkungan,
- e) Memungkinkan peluang untuk melahirkan sumber-sumber penghasilan yang baru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f) Memberdayakan masyarakat serta pihak-pihak lain dalam perencanaan yang merata pada kebijakan publik secara demokratis.

Menurut Alshehri dan Drew (2010), klasifikasi utama guna mencapai target *E-Government* berkaitan dengan masyarakat, pemerintah, karyawan lembaga publik, dan para pebisnis. Perbedaan jenis dan kebutuhan dalam pengembangan berkelanjutan itu sendiri membuat adanya perbedaan klasifikasi tersebut. Adapun deskripsi mengenai klasifikasi-klasifikasi tersebut antara lain sebagai berikut.

a) *Government to Citizens (G2C)*

Pada klasifikasi kelompok menjelaskan tentang penyediaan layanan oleh instansi pemerintah. Dalam hal ini, instansi dapat lebih dekat berkomunikasi dengan kebutuhan masyarakat melalui layanan publik yang akuntabilitas dan demokratis. Masyarakat juga dimungkinkan dimudahkan dalam hal mengakses layanan dan informasi yang fleksibel (kapanpun dan dimanapun). Partisipasi dari masyarakat untuk berkembang dan mendukung perkembangan sangat diharapkan dan dibutuhkan untuk meningkatkan pelayanan berbasis *online* tersebut.

b) *Government to Business (G2B)*

Klasifikasi ini mengaitkan antara pelaku usaha (bisnis) dan instansi pemerintahan. *E-procurement* merupakan salah satu contoh klasifikasi dalam aplikasi transaksi elektronik pada G2B. Aplikasi tersebut diproyeksikan menciptakan lingkungan bisnis yang kompetitif, melalui cara perancangan aplikasi guna memotong alur birokrasi yang berbelit dan penyederhanaan proses regulasi. Hal tersebut tentunya mampu mengefisiensikan biaya dan waktu dari pemilik bisnis yang menjalin kerjasama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

 c) *Government to Government* (G2G)

Selain bisnis dan masyarakat, ada juga klasifikasi antara pemerintah dengan pemerintah. Dimana hal ini merujuk pada tingkatan structural instansi pemerintahan baik nasional, regional, maupun internasional. Pada klasifikasi ini ditandai adanya penerapan sistem canggih pelayanan yang efektif dan bermanfaat terhadap kerjasama ataupun kesepakatan. Kerjasama tersebut tentunya berbasis secara *online* yang memungkinkan antar institusi dapat berbagi informasi sumber daya, *database*, keterampilan, dan sumber daya yang ada secara bersamaan.

 d) *Government to Employees* (G2E)

Klasifikasi terakhir ini berhubungan antara pemerintah dengan para pegawai. Karyawan akan diarahkan untuk saling berbagi dan mengakses informasi dalam mengembangkan kinerja pemerintahan. Adapun informasi tersebut meliputi peningkatan pelatihan, kompensasi, sosialisasi manfaat kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan hak masyarakat. Klasifikasi ini berguna untuk menghadirkan mekanisme yang taktis dan strategis dalam membantu program dan tujuan pemerintah dalam mengelola sumber daya manusia (pegawai). *E-Administration* merupakan bukti diterapkannya klasifikasi ini dalam pengelolaan semua administrasi yang berkaitan dengan pegawai.

Retnowati (2008) mengatakan ada beberapa faktor-faktor dalam hal menentukan keberhasilan penerapan *E-Government*. Hal tersebut antara lain kebutuhan masyarakat sebagai prioritas utama, penyediaan infraskstruktur terkait, jaringan dan konektivitas oleh pemerintah, dana, dan Sumber Daya Manusia (SDM), serta penganggaran, ketersediaan *legal standing* dan juga edukasi perubahan paradigma masyarakat. Akan tetapi, menurut Wirawan (2020 : 12), ada

tiga hal hambatan ataupun kendala dalam penerapan *E-Government* yang mendasar pada lingkup pemerintahan daerah antara lain sebagai berikut.

- a) Inisiatif yang kurang dari pemerintahan daerah itu sendiri.
- b) Sistem manajemen pemerintah daerah yang belum didukung oleh situs web daerah yang memadai.
- c) Perspektif daerah yang mayoritas berpikiran bahwa implementasi *E-Government* hanya cukup memiliki halaman web (*web presence*) saja.

Menurut Wirawan (2020) pada era industri 4.0 sekarang ini, *E-Government* sangat diperlukan untuk menyokong pembangunan berbagai lapisan kehidupan. Peralihan digitalisasi ini harus menjadi perhatian bersama dalam pengimplementasiannya terutama dalam penyelenggaraan pemerintah itu sendiri. Pada perkembangannya ditemukan bahwa dalam hal kuantitas meningkat, namun dari segi kualitas masih kurang ataupun belum memadai. Hal ini dikarenakan, pemerataan yang belum ke daerah-daerah dan masih hanya dianggap sebagai informasi statistika saja.

Selanjutnya, kita juga harus memikirkan bagaimana proyeksi *E-Government* ini kedepannya agar terwujud pengelolaan pemerintah yang baik dan efektif. Proyeksi tersebut meliputi regulasi hukum yang jelas, edukasi dari pemerintah, penyediaan dalam bidang teknologi, SDM yang memadai dari pihak instansi dan masyarakat, pembentukan *mindset* perubahan paradigma tentang etos kerja yang efisien, dan juga berkaitan dengan moral. Hal tersebut dilakukan agar terbentuknya tatanan pemerintahan dan masyarakat berbasis teknologi yang baik. Maka dari itu, hal ini semua tidak akan terjadi bila tidak ada kemampuan, kemauan, dan proyeksi yang jelas dari pemerintah. *E-Government* diharapkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3 SI DILAN

Aplikasi Digital Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SI DILAN) merupakan salah satu penerapan *E-Government* berbasis aplikasi dalam mengelola arsip Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. SI DILAN diinisiasi oleh seorang pegawai BAPPEDA Indragiri Hulu yaitu Rendy Rozadin, S.T. Aplikasi kemudian diluncurkan pertama kali secara resmi oleh Plt. Kepala BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hulu, H. Syahrudin, S.Sos, MT bertempat Ruang Rapat BAPPEDA yang dihadiri oleh seluruh ASN. Peluncuran tersebut juga menandakan pelaksana kegiatan melakukan entri data LPJ wajib melalui SI DILAN.



Gambar 2.1 Peluncuran SI DILAN (Arsip BAPPEDA)

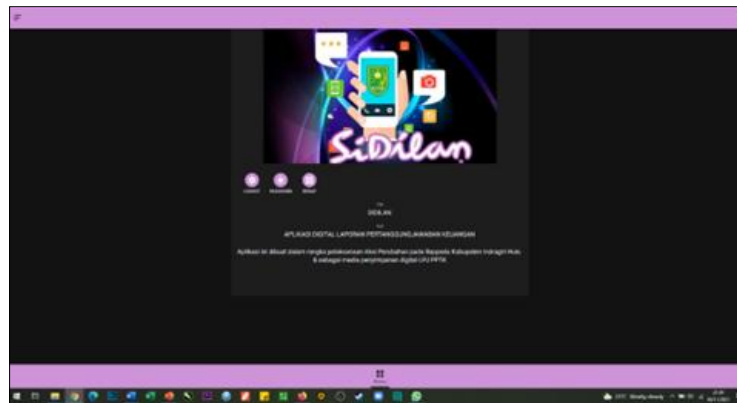
Latar belakang pengadaan SI DILAN pada pelaksanaan kegiatan

BAPPEDA Indragiri Hulu, didasari beberapa hal sebagai berikut.

- a) Aksi perubahan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)
- b) Belum adanya media arsip LPJ digital BAPPEDA
- c) Mempermudah dalam pelaksanaan Verifikasi LPJ

Berikut tampilan Aplikasi Digital Pengelola Keuangan (SI DILAN)

BAPPEDA Indragiri Hulu.



Gambar 2.2 Tampilan SI DILAN melalui perangkat komputer

Selain itu, pengadaan aplikasi tersebut juga didasari dan dilindungi oleh perundang-undangan dan hukum yang berlaku. Adapun dasar hukum dalam pengadaan SI DILAN ini antara lain.

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
- Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- Surat Keputusan Kepala Bappeda Nomor 050/Bappeda-SK/64 tanggal 27 Oktober 2021 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Aplikasi Digital Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SI DILAN).
- Standar Operasional Prosedur SI DILAN Nomor 1.8.2.3.5 tanggal 27 Oktober 2021 Tanggal Efektif 1 November 2021.

Adapun tujuan-tujuan yang diharapkan dalam implementasi SI DILAN, antara lain sebagai berikut.

- Mengawasi (*monitoring*) pegawai BAPPEDA Indragiri Hulu dalam hal tata kelola Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Keuangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

 © Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b) Memudahkan pengarsipan dan pencarian data-data keuangan terdahulu yang telah tersusun dinamis.

Berikut struktur pengelola aplikasi SI DILAN yang tersaji dalam data pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Struktur Tim Pengelola Aplikasi

No.	Nama	Jabatan Dalam Tim
1.	Rendy Rozadin, ST	Admin Utama
2.	Sri Supriantoni, S.Si	Admin Utama
3.	Hellen, Amd	Admin Sekretariat
4.	Legina Apriani, A.Md	Admin Perencanaan
5.	Maria Yustina Gurning, S.E	Admin Ekonomi
6.	Rivan Pardian, S.E	Admin Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat
7.	Risna Neli Rahmadani, A.Md	Admin Fisik & Prasarana
8.	Reski Syafriansyah, SE	Admin Sekretariat Pembantu
9.	Raja Afrida Ulfa, SH	Admin Sekretariat Pembantu
10.	Reza Elyansayah, SE	Admin Sekretariat Pembantu
11.	Toufik Dwi Sugiyantor, S.Kom	Admin Perencanaan Pembantu
12.	M. Rifandi Rigo, SE	Admin Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat Pembantu
13.	Agung Ramadahan, SE	Admin Ekonomi Pembantu
14.	Ranti Yuliani, SE	Admin Fisik & Prasarana Pembantu

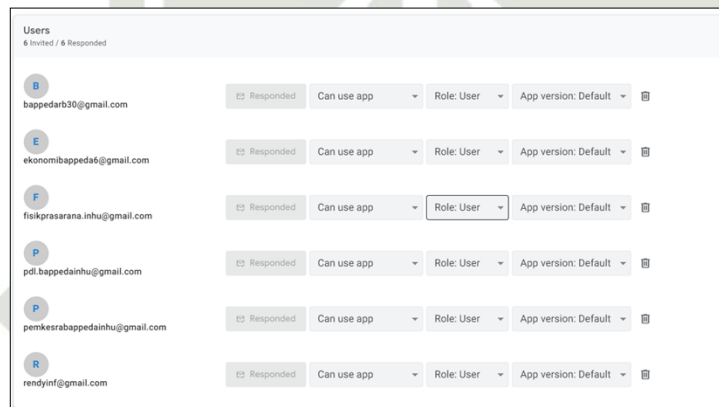
Sumber : BAPPEDA, 2022)

Berdasarkan *Manual Book* SI DILAN (2021), aplikasi ini merupakan sebuah media yang menyediakan penyimpanan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Keuangan yang berbasis *smartphone* ataupun komputer dengan keamanan yang ketat. Keamanan aplikasi ini berguna dalam menyimpan dokumen bukti dari penggunaan anggaran pada perangkat daerah Kabupaten Indragiri Hulu yang

penting. Adapun tata cara penggunaan aplikasi tersebut melalui *smartphone* antara lain sebagai berikut.

a) Tata Cara Instalasi

Daftarkan *email* yang akan digunakan kepada admin Utama, dikarenakan aplikasi ini hanya bisa dibuka oleh *user* yang telah melakukan pendaftaran *email* melalui admin utama.



Gambar 2.3 Undangan Penggunaan Aplikasi Dikirim Melalui Email yang Telah Didaftarkan

b) Tampilan Halaman Utama

Tampilan Halaman Utama Si Dilan berisi tentang informasi pembuatan aplikasi dan tersedia menu untuk Login.



Gambar 2.4 Tampilan Menu Utama SI DILAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

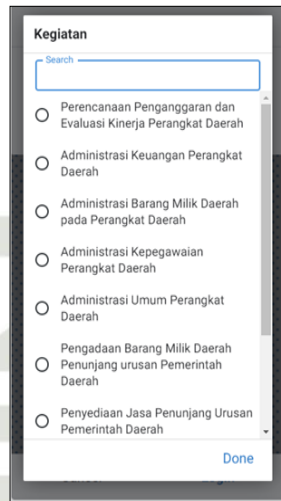
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

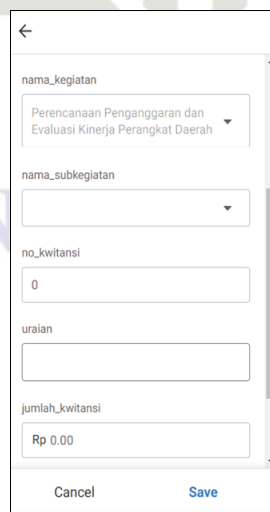
Silakan login dengan menggunakan *user* yang telah diberikan oleh Admin Utama dengan *Password Default* “004”, kemudian pilih kegiatan sesuai dengan data yang ingin anda *input*.



Gambar 2.5 Pilihan Nama Kegiatan yang Datanya Ingin Dimasukkan

c) Tampilan Halaman Entri Pengguna

Setelah berhasil login masuk ke “Menu Rekap”, silahkan tambahkan data yang akan dientri pengguna beserta bukti Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tersebut.



Gambar 2.6 Tampilan Tempat Penyimpanan Data

d) Tampilan Halaman Rekap Hasil Entri

Hasil Entri akan terekap pada halaman rekam sesuai dengan sub kegiatan dan bulan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



nama_subkegiatan	Total Belanja	ta
Penyusunan Dokumen Perenca...	1,200,000	20
Evaluasi Kinerja Perangkat Daer...	5,000,000	20
Penyusunan Dokumen Perenca...	1,200,000	20

Gambar 2.7 Tampilan Halaman Hasil Entri SI DILAN memiliki desain bertujuan kedepannya yang dibagi dalam tiga implementasi waktu, antara lain sebagai berikut.

- a) Jangka pendek
 - 1) Terbentuknya Tim Kerja Pengelola LPJ
 - 2) Tersedianya Fakta Integritas tertib LPJ
 - 3) Terbentuknya Tim Pengelola SI DILAN
 - 4) Tersedianya SI DILAN
 - 5) Tersedianya SOP (Standar Operaional Kerja) SI DILAN
 - 6) Terlaksananya Uji Coba SI DILAN
- b) Jangka Menengah
Terlaksananya aplikasi digital laporan pertanggungjawaban keuangan (SI DILAN).
- c) Jangka Panjang
Optimalnya pengelolaan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Kantor BAPPEDA Indragiri Hulu.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa

pengelolaan keuangan daerah harus terintegrasi termasuk BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hulu dalam mengelola keuangan melalui SI DILAN. Peraturan tersebut merupakan pengganti peraturan sebelumnya yaitu Pemendagri Nomor 98 Tahun 2018. Aplikasi pengelolaan tersebut dinamakan SIPD atau Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dimana memuat sistem informasi daerah berupa perencanaan pembangunan daerah, pembinaan daerah, keuangan daerah, sistem pemerintahan daerah, dan juga pengawasan daerah.

Aplikasi SIPD dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan tujuan untuk mempermudah dan mempercepat dalam melaksanakan pengawasan dan pelayanan publik di pemerintahan daerah-daerah yang ada di Indonesia. Hal tersebut sebagai bentuk pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penganggaran, dan Tata Keola Keuangan dari Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan Daerah menjadi Sistem Informasi Pemerintah Daerah pada Pasal 222 yang menjelaskan mengenai kewajiban pemerintahan daerah mengelola keuangan daerah secara terintegrasi melalui aplikasi yang terintegrasi yaitu SIPD. Dimana hal ini diharapkan dapat mewujudkan akuntabilitas, transparans, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah untuk mengelola perencanaan pembangunan daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 2.8 Tampilan Awal Aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah).

BAPPEDA Indragiri Hulu yang sudah menerapkan pengelolaan keuangan melalui SI DILAN, memberikan kemudahan dalam melaporkan perencanaan dan keuangan daerah kepada pengawasan pusat oleh BPKAD. Laporan pertanggungjawaban keuangan dan perencanaan berserta dokumen pendukung yang telah dilaporkan dan diarsipkan melalui SI DILAN terlebih dahulu akan diperiksa dan diawasi oleh Kepala Sub Bagian Keuangan yang juga sebagai admin utama aplikasi. Hal ini bertujuan agar data yang disampaikan sesuai dan valid ketika diperiksa oleh BPKAD melalui SIPD ataupun inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan).

Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa penggunaan digitalisasi pemerintahan dapat mempermudah pengelolaan pemerintah antara daerah dan pusat yang efektif dan efisien. Aplikasi yang terintegrasi dengan baik dapat membantu masyarakat dalam mengawasi pembangunan daerah yang ada. Menurut Sandiasa dan Agustana (2017), pembangunan di setiap bidang yang ada dalam hal menyampaikan informasi yang efektif serta melibatkan orang banyak dapat

memanfaatkan teknologi digitalisasi pengelolaan pemerintahan daerah di masa sekarang maupun yang akan datang. Sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menerangkan bahwa adanya jaminan setiap warga negara dalam mengakses informasi publik yang harus dilaksanakan melalui SIPD tersebut (Riyanto, 2017).

2.4 Definisi Konsep

Definisi konsep yang digunakan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut.

- a) Inovasi adalah setiap pembaharuan yang dilaksanakan sebagai penyelesaian masalah dan perwujudan pengembangan dalam setiap bidang yang ada, guna menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman yang dinamis.
- b) *E-Government* adalah penggunaan teknologi sebagai inovasi pelayanan oleh pemerintahan agar penyelenggaraan berjalan sistematis, efektif dan efisien, serta berkelanjutan guna mendukung pengembangan dan pembangunan negara.
- c) SI DILAN (Aplikasi Digital Laporan Pertanggungjawaban Keuangan) adalah inovasi layanan digitalisasi dalam *website* yang membantu sistematis pengelolaan keuangan pada Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau.

2.5 Konsep Operasional

Menurut Indrajit (2006), setiap perkumpulan baik organisasi maupun komunitas pada sebuah daerah maupun negara, pasti memiliki karakteristik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan dan kondisi yang unik. Kebutuhan tersebut menjadi prioritas utama dengan persiapan sumber daya yang ada pada domain pemerintahan maupun masyarakat tersebut. Maka dari itu, permasalahan kesiapan untuk penerapan prinsip *E-Government* bukan hanya masalah pemerintah saja, tetapi adalah masalah bersama setiap elemen yang terkait, seperti masyarakat, bisnis, komunitas, dan sebagainya. Selain itu, dalam hal tersebut perlu dirumuskan faktor-faktor penentu yang menjadi bahan pertimbangan dalam penerapan *E-Government* dalam kesiapannya.

Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini diperlukan adanya panduan-panduan mengenai kajian ini bisa dijalankan secara optimal dan sesuai dengan tujuan. Operasional dalam penelitian harus memiliki konsep yang jelas dan sistematis, maka dari itu diperlukan yang namanya konsep operasional. Konsep operasional merupakan panduan operasional kegiatan dalam hal ini penelitian (SI DILAN) terkait variable-variabel penelitian, data, maupun indikator untuk mencapai pemahaman proses bagi semua orang ataupun pengamat. Pada penelitian ini, konsep operasional yang digunakan dan diterapkan dalam mengelola data penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah ini (Indrajit, 2006).

Tabel 2.2 Konsep Operasional SI DILAN

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Penerapan SI DILAN Pada Pengelolaan Keuangan di Kantor BAPPEDA, Kabupaten Indragiri Hulu	Infrastruktur Telekomunikasi	a) Penyediaan perangkat keras (<i>Hardware</i>) terutama untuk pusat kontrol (Admin Utama). b) Jaringan yang memadai dan stabil di lingkup perkantoran. c) Penyediaan ruang penyimpanan berkas softfile untuk arsip yang memadai. d) Pelaksanaan <i>back up</i> arsip

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		data berkala yang sistematis.
	Sumber Daya Manusia (SDM) di Pemerintahan	a) Pengadaan pelatihan (<i>training</i>) serta evaluasi penggunaan b) Pemahaman terhadap aplikasi dan kecakapan terhadap penggunaannya.
	Ketersediaan Dana dan Anggaran	a) Pengadaan anggaran untuk biaya perawatan dan pengembangan aplikasi. b) Pengadaan dana dalam mem- <i>back up</i> arsip data <i>sofffile</i> . c) Pengoptimalan anggaran per tahun dalam pengembangan aplikasi. d) Penyediaan anggaran untuk pelatihan penggunaan aplikasi bagi pegawai berupa presentasi ataupun demonstrasi
	Perangkat Hukum	a) Adanya <i>legal standing</i> terkait operasional aplikasi. b) Adanya <i>legal standing</i> terkait Hak Cipta Intelektual . c) Perlindungan (<i>security officer</i>) terhadap data pengelolaan keuangan
	Penyesuaian Paradigma	a) Tingkat adaptasi pegawai terhadap peralihan metode pelaporan pengelolaan keuangan.

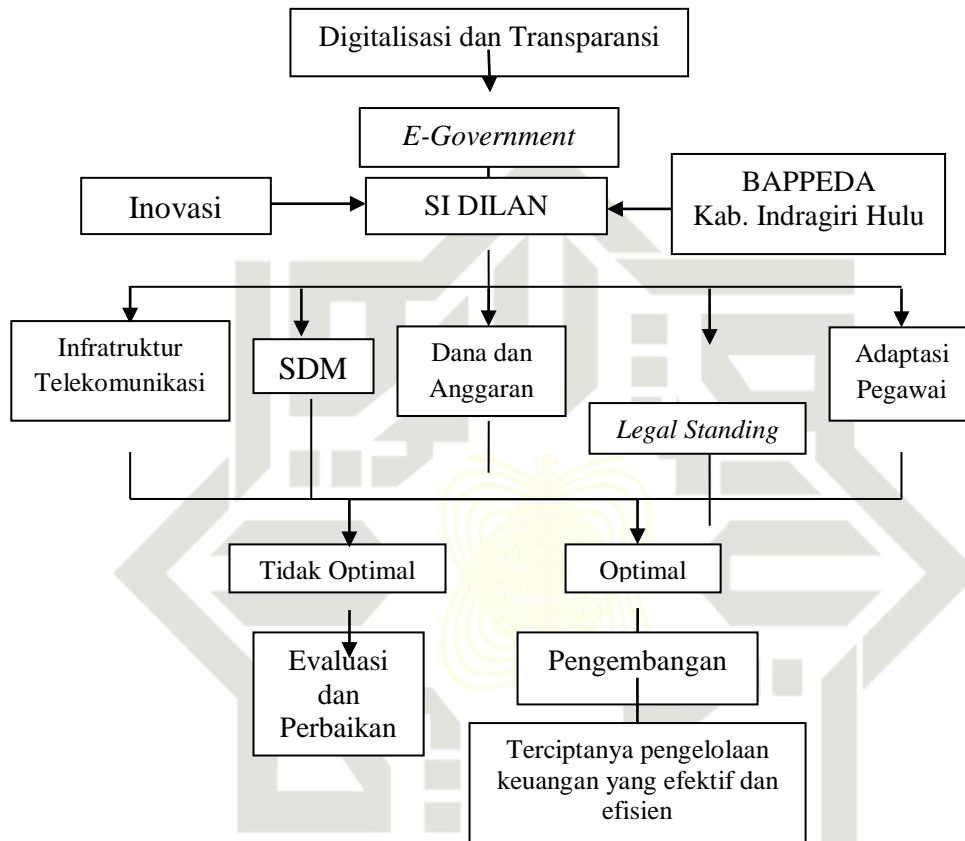
2.6 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran yang bertujuan untuk membantu menentukan alur konseptual, teori, serta pengkajian pelaksanaan. Dalam kerangka pemikiran ini terdapat variabel-variabel permasalahan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diteliti sehingga nantinya dapat memetakan dan menjawab permasalahan itu sendiri. Adapun kerangka pemikiran penelitian ini disajikan pada gambar berikut.



Gambar 2.9 Kerangka Pemikiran Penelitian



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Indragiri Hulu, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Perangkat daerah tersebut merupakan salah satu instansi pemerintahan daerah yang mengelola keuangan dalam mendukung perencanaan dan pembangunan daerah. Alasan pemilihan tempat penelitian ini dikarenakan peneliti merasa tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam digitalisasi pemerintahan daerah (*E-Government*) dalam tata kelola kinerja dan keuangan. Waktu dan penjabaran pelaksanaan penelitian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No.	Kegiatan	Januari				Februari				Maret			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	Pengurusan Izin Penelitian												
2.	Pelaksanaan Penelitian												
3.	Analisis Hasil												
4.	Pembuatan Laporan Hasil Penelitian												

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian SI DILAN yaitu deskriptif kualitatif. Menurut Sugiono (2011), metode deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang memberikan gambaran dengan melukiskan atau memaparkan kondisi maupun keadaan objek yang diteliti sesuai dengan apa adanya.

Metode ini bertujuan agar setiap pembaca dapat memahami kajian studi penelitian sesuai dengan fakta dan data di lapangan. Penerapan metode tersebut dalam penelitian ini menggunakan teknik *key informan*, yaitu yaitu memilih subjek penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu. Adapun *key informan* dalam penelitian ini adalah Kepala Sub Bagian Keuangan sebagai admin utama dan pencetus aplikasi dan admin-admin di setiap bidang Kantor BAPPEDA Indragiri Hulu.

3.3 Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder, adapun penjelasannya sebagai berikut.

1) Data Primer

Sumber data primer penelitian ini didapatkan dari wawancara dengan beberapa narasumber terkait, yang selanjutnya dilakukan pengamatan atau observasi langsung dengan tujuan menyesuaikan keterangan dengan fakta di lapangan. Pencatatan data-data merupakan keluaran penelitian yang berasal dari kegiatan mengamati, mendengar, dan menanyai tentang apa saja yang diperlukan dalam kajian penelitian. Faktor kenyamanan komunikasi menjadi faktor pendukung terjalannya komunikasi antara peneliti dengan narasumber atau informan dengan baik. Hal inilah yang kemudian membuat narasumber akan menjadi lebih leluasa memberikan informasi, mengutarakan pendapat, maupun memberikan data.

Narasumber penelitian ini terdiri dari dua subjek meliputi admin utama dan beberapa admin setiap bidang. Admin utama merupakan orang yang bertanggungjawab dan mengawasi para admin bidang dalam menerapkan SI-DILAN pada pengelolaan keuangan. Sedangkan admin bidang merupakan orang

yang memiliki tugas mengelola, melaporkan, dan mengarsipkan laporan keuangan. Adapun bidang-bidang yang menerapkan SI DILAN yaitu Ekonomi, Fisik & Prasarana, Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat, Perencanaan Daerah & Peneliti Pengembangan, dan Sekretariat.

2) Data Sekunder

Data sekunder meliputi sumber-sumber yang secara tidak langsung memberikan data-data pendukung terkait penelitian, misalnya bersumber dari orang lain, dokumen, maupun literatur pendukung. Dimana sumber tersebut berkaitan mengenai penerapan *E-Government* (SI DILAN) di Kantor BAPPEDA Indragiri Hulu. Data sekunder yang diperoleh meliputi Manual Book SI DILAN, Literatur Rancangan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi (Pelatihan Kepemimpinan Pengawas/PKP) Tahun 2021, serta Presentasi Sosialisasi dan Peluncuran SI DILAN.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa jenis teknik pengumpulan data untuk meneliti permasalahan antara lain sebagai berikut.

1) Wawancara

Wawancara adalah teknik dalam hal memperoleh informasi dengan interaksi (bertanya langsung) melalui komunikasi dan interaksi dua arah (Soemitro, 1994). Gambaran mengenai penerapan *E-Government* di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Indragiri Hulu akan didapatkan melalui teknik ini juga. Wawancara dilakukan pada penelitian ini dengan Kepala dan pegawai BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hulu. Hal ini dilakukan untuk menggali informasi utama maupun pendukung secara langsung mengenai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagaimana dalam pelaksanaan kebijakan *Electronic Government* di Kabupaten Indragiri Hulu.

2)

Observasi

Observasi adalah pengumpulan data secara sistematis dan selektif dalam hal pengamatan, kejadian, dan interaksi yang terjadi terkait informasi yang didapatkan. Jadi metode ini secara langsung dilaksanakan di tempat penelitian terjadi, terhadap dan objek permasalahan yang ada (Sugiyono, 2009).

3.5 Teknik Analisis Data

Analisa deskriptif merupakan metode analisis yang digunakan pada penelitian ini. Metode tersebut bertujuan untuk memberikan deskripsi kejadian, perilaku individu, atau keadaan pada objek tertentu. Penyajian metode ini dipaparkan dalam bentuk narasi secara mendalam. Oleh karena hal itu, pada tahap ini diperlukan analisis lebih lanjut menggunakan tahapan-tahapan analisis sebagai berikut (Milles dan Huberman, 1992).

1)

Reduksi Data

Tahapan ini mengarah kepada pengoptimalan informasi berupa penyederhanaan, klasifikasi, dan membuang data yang tidak diperlukan. Hal tersebut dilakukan untuk narasi penelitian yang lebih efisien dan memudahkan dalam hal menarik kesimpulan.

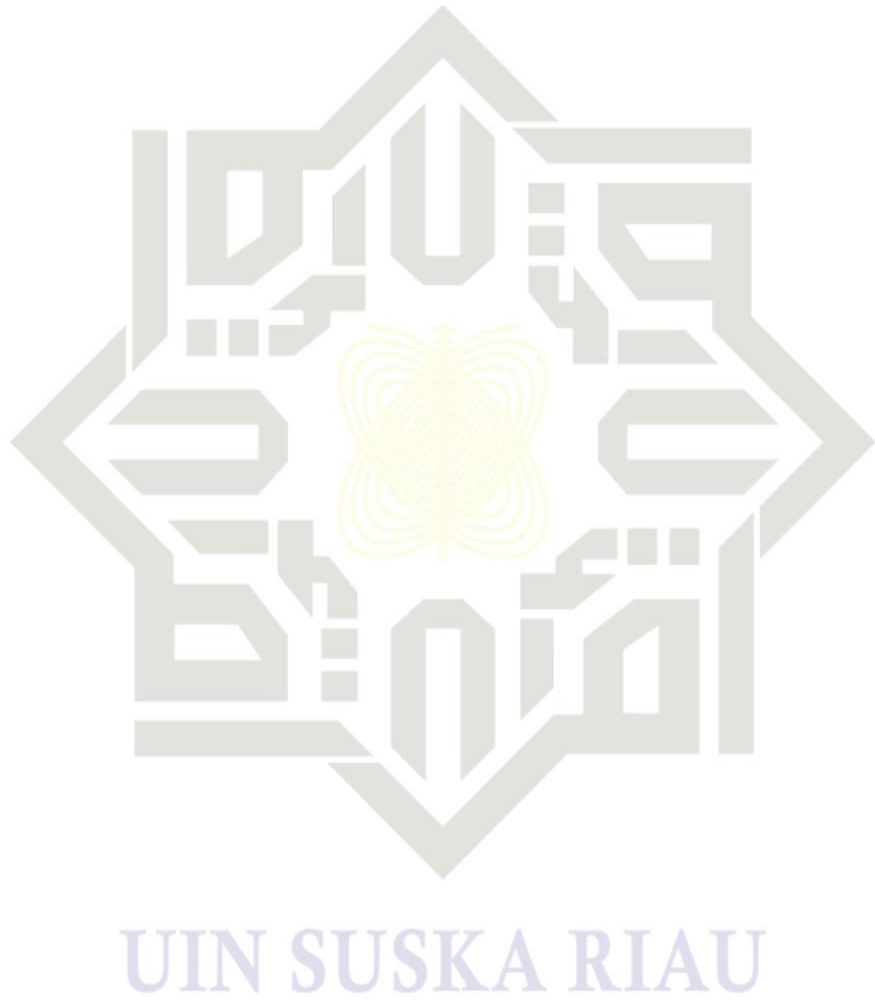
2)

Penyajian Data

Pada tahap ini, data dipaparkan dalam narasi tulisan berdasarkan rumusan permasalahan yang terjadi di lapangan, dengan cara yang mudah dipahami dan sistematis. Data juga akan ditampilkan dalam bentuk *display* guna agar memahami apa yang terjadi sebenarnya, seperti data kualitatif dalam bagan.

Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Pada tahap akhir ini, rumusan permasalahan yang didapatkan akan dicari hasil dan jawabannya. Selanjutnya, verifikasi data dilakukan untuk membantu dalam menarik kesimpulan terhadap rumusan pada penelitian ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1 Sejarah Kabupaten Indragiri Hulu

Pada awalnya, menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 menerangkan bahwa Kabupaten Indragiri Hulu merupakan sebuah kesatuan daerah di dalam Kabupaten Indragiri. Hingga pada akhirnya 9 tahun berselang, pada tahun 1965 berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1965 Kabupaten Indragiri tersebut dimekarkan menjadi dua kabupaten yaitu Indragiri Hilir dengan Ibukotanya Tembilahan dan Indragiri Hulu dengan Ibukotanya Rengat. Kabupaten Indragiri Hulu pada saat itu terdiri dari beberapa kecamatan sebagai berikut.

- 1) Kec. Rengat, Ibukota Rengat
- 2) Kec. Seberida, Ibukota Pangkalan Kasai
- 3) Kec. Pasir Penyu, Ibukota Air Molek
- 4) Kec. Singingi, Ibukota Muara Lembu
- 5) Kec. Peranap, Ibukota Peranap
- 6) Kec. Kuantan Hilir, Ibukota Baserah
- 7) Kec. Kuantan Tengah, Ibukota Taluk Kuantan
- 8) Kec. Kuantan Mudik, Ibukota Lubuk Jambi

Selanjutnya pada tahun 1996 terjadi penambahan kecamatan dengan adanya pemekaran daerah dari tiga kecamatan yaitu Kuantan Tengah, Pasir Penyu, dan Rengat. Adapun kecamatan-kecamatan tersebut meliputi Benai dengan Ibukota Benai, Kelayang dengan Ibukota Simpang Kelayang, dan

Rengat Barat dengan Ibukota Pematang Reba. Pada tahun 1999, Kabupaten Indragiri Hulu terjadi pemekaran wilayah yang menghasilkan dua kabupaten yaitu Indragiri Hulu berkedudukan di Rengat dan Kuansing yang berkedudukan di Taluk Kuantan. Kemudian setelah tiga tahun, Kabupaten Indragiri Hulu yaitu pada tahun 2004 menetapkan pemekaran daerah menjadi 14 kecamatan yang dikenal hingga saat ini. Adapun kecamatan-kecamatan tersebut antara lain sebagai berikut.

- 1) Kec. Rengat, Ibukota Rengat
- 2) Kec. Rengat Barat, Ibukota Pematang Reba
- 3) Kec. Pasir Peny, Ibukota Air Molek
- 4) Kec. Seberida, Ibukota Pangkalan Kasai
- 5) Kec. Lirik, Ibukota Lirik
- 6) Kec. Kuala Cenaku, Ibukota Kuala Cenaku.
- 7) Kec. Sungai Lala, Ibukota Kelawa
- 8) Kec. Peranap, Ibukota Peranap
- 9) Kec. Batang Gangsal, Ibukota Seberida
- 10) Kec. Batang Cenaku, Ibukota Aur Cina
- 11) Kec. Batang Peranap, Ibukota Pematang
- 12) Kec. Kelayang, Ibukota Simpan Kelayang
- 13) Kec. Rakit Kulim, Ibukota Petonggan
- 14) Kec. Lubuk Batu Jaya, Ibukota Lubuk Batu Tinggal

Kabupaten Indragiri Hulu memiliki luas wilayah seluas 819.826,0 Ha atau 8.198.26 km². Wilayah tersebut terdiri dari daratan rendah dan daratan tinggi (rawa-rawa) ketinggian 50-100 mdpl. Secara geografis, Kabupaten Indragiri Hulu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terletak di $0^{\circ}15'$ Lintang Utara, $1^{\circ}5'$ Lintang Selatan, $101^{\circ}10'$ Bujur Timur, $102^{\circ}48'$ Bujur Barat, dimana berbatasan dengan beberapa wilayah sebagai berikut.

- Utara : Kabupaten Pelalawan
- Barat : Kabupaten Kuantan Singingi
- Selatan : Kabupaten Bungo Tebo (Provinsi Jambi)
- Timur : Kabupaten Indragiri Hilir

4.2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Indragiri Hulu

Penelitian ini dilakukan pada salah satu institusi pemerintahan pengelolaan keuangan di Kabupaten Indragiri Hulu, yaitu Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hulu merupakan salah satu institusi pemerintah daerah yang menjalankan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi serta Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini tentunya demi mewujudkan pengelolaan anggaran dan perencanaan pembangunan daerah yang optimal dan transparansi.



Gambar 4.2 Kantor BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hulu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara umum, BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hulu berfungsi sebagai sebuah badan daerah tingkat kabupaten yang mensinergikan perencanaan dan pembangunan daerah ke dalam sistem perencanaan dan pembangunan nasional. Maka dari itu diperlukan juga pengawasan dan pertanggungjawaban dalam hal pelaporan kegiatan, dalam hal ini Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) berbasis *E-Government* SI DILAN. BAPPEDA Indragiri Hulu terdiri dari beberapa bidang-bidang dalam menunjang dan menjalankan tugasnya, yaitu sebagai berikut.

1. Ekonomi
2. Fisik & Prasarana
3. Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat
4. Perencanaan Daerah & Peneliti Pengembangan
5. Sekretariat

4.3 Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu

Visi

Adapun visi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Indragiri Hulu yaitu.

"Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Fokus, Aspiratif, dan Berkelanjutan"

Dalam hal ini BAPPEDA ditugaskan sebagai Satuan Kerja Perencanaan yang diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait pembangunan daerah di setiap bidang. Adapun penggunaan kata Fokus, Aspiratif dan Berkelanjutan memiliki makna sebagai berikut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun misi guna mewujudkan visi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Indragiri Hulu antara lain sebagai berikut.

- 1) Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas, Aspiratif, dan Aplikatif,
- 2) Meningkatkan Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik;
- 3) Meningkatkan kompetensi Aparatur Perencana menuju lembaga perencana yang professional.

Dalam upaya mencapai misi tersebut, maka dibutuhkan segala sumber daya Bappeda dengan kinerja yang maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu yang dijabarkan ke dalam Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, menyebutkan bahwa BAPPEDA tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang urusan pemeritahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dengan fungsi sebagai berikut.

- a) Perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- c) Pelaksanaan administrasi perencanaan pembangunan daerah.
- d) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Melihat uraian dari tugas dan fungsi di atas, BAPPEDA memiliki peran sebagai pengambil kebijakan dan keputusan dalam hal perencanaan, administrastor, dan koordinator yang dijabarkan secara strategis melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatannya. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, BAPPEDA dibagi menjadi beberapa bidang yaitu Ekonomi, Fisik & Prasarana, Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat, Perencanaan Daerah & Peneliti Pengembangan, dan Sekretariat. Kelima bidang tersebut dibagi dengan tujuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk membantu kinerja pengelolaan perencanaan dan pembangunan daerah di Kabupaten Indragiri Hulu. Setiap bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Adapun uraian tugas masing-masing bidang tersebut antara lain sebagai berikut.

T)

Bidang Ekonomi

Bidang Ekonomi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada Sub Bidang Pangan Pertanian dan Perikanan, Sub Bidang Investasi Industri dan Koperasi, dan Sub Bidang Pemberdayaan dan Tenaga Kerja. Dalam menjalankan urusan tersebut, Bidang Ekonomi mempunyai uraian tugas sebagai berikut.

- a) Menyelenggarakan Perencanaan pada Sub Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan, Sub Bidang Investasi, Industri dan Koperasi, Sub Bidang Pemberdayaan dan Tenaga Kerja;
- b) Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas pada Sub Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan, Sub Bidang Investasi, Industri dan Koperasi, Sub Bidang Pemberdayaan dan Tenaga Kerja;
- c) Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Sub Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan, Sub Bidang Investasi, Industri dan Koperasi, Sub Bidang Pemberdayaan dan Tenaga Kerja;
- d) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Sub Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan, Sub Bidang Investasi, Industri dan Koperasi, Sub Bidang Pemberdayaan dan Tenaga Kerja;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Bidang Fisik & Prasarana

Bidang Fisik & Prasarana mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pada Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Sub Bidang Perumahan Permukiman dan Lingkungan Hidup, dan Sub Bidang Perhubungan dan Komunikasi Informatika. Dalam menjalankan urusan tersebut, Bidang Fisik & Prasarana mempunyai uraian tugas sebagai berikut.

- a) Menyelenggarakan Perencanaan pada Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Sub Bidang Perumahan, Pemukiman dan Lingkungan Hidup serta Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- b) Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas pada Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Sub Bidang Perumahan, Pemukiman dan Lingkungan Hidup serta Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- c) Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Sub Bidang Perumahan, Pemukiman dan Lingkungan Hidup serta Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- d) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Sub Bidang Perumahan, Pemukiman dan Lingkungan Hidup serta Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

3) Bidang Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat

Bidang Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur, Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat, dan Sub Bidang Kependudukan, Ketentraman

© Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat. Dalam menjalankan urusan tersebut, Bidang Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat mempunyai uraian tugas sebagai berikut.

- a) Menyelenggarakan Perencanaan pada Sub Pemerintahan dan Aparatur, Sub Kesejahteraan Rakyat, Sub Bidang Kependudukan, Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
- b) Menyelenggarakan Pelaksanaan Tugas pada Sub Pemerintahan dan Aparatur, Sub Kesejahteraan Rakyat, Sub Bidang Kependudukan, Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
- c) Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Sub Pemerintahan dan Aparatur, Sub Kesejahteraan Rakyat, Sub Bidang Kependudukan, Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
- d) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Sub Pemerintahan dan Aparatur, Sub Kesejahteraan Rakyat, Sub Bidang Kependudukan, Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;

4) Bidang Perencanaan Daerah & Peneliti Pengembangan
 Bidang Perencanaan Daerah dan Penelitian Pengembangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian, Sub Bidang Penelitian dan Data, dan Sub Bidang Perencanaan Daerah. Dalam menjalankan urusan tersebut, Bidang Perencanaan Daerah & Peneliti Pengembangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a) Menyelenggarakan Perencanaan Pelaksanaan, Pengendalian, Pengawasan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Sub Bidang Perencanaan Daerah, Sub Bidang penelitian Pengembangan dan Data, Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi;

b) Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Sub Bidang Perencanaan Daerah, Sub Bidang penelitian Pengembangan dan Data, Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi

5) Bidang Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan program, umum, perlengkapan, tata usaha, kepegawaian dan keuangan Badan. Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan data, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi penyusunan program dan anggaran, ketatausahaan, pembinaan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, kehumasan, serta keuangan. Dalam menjalankan urusan tersebut, Bidang Sekretariat mempunyai uraian tugas sebagai berikut.

a) Menyelenggarakan Perencanaan pada Sub Bagian Umum, Program dan Keuangan Badan;

b) Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas pada Sub Bagian Umum, Program dan Keuangan Badan;

c) Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Sub Bagian Umum, Program dan Keuangan Badan;

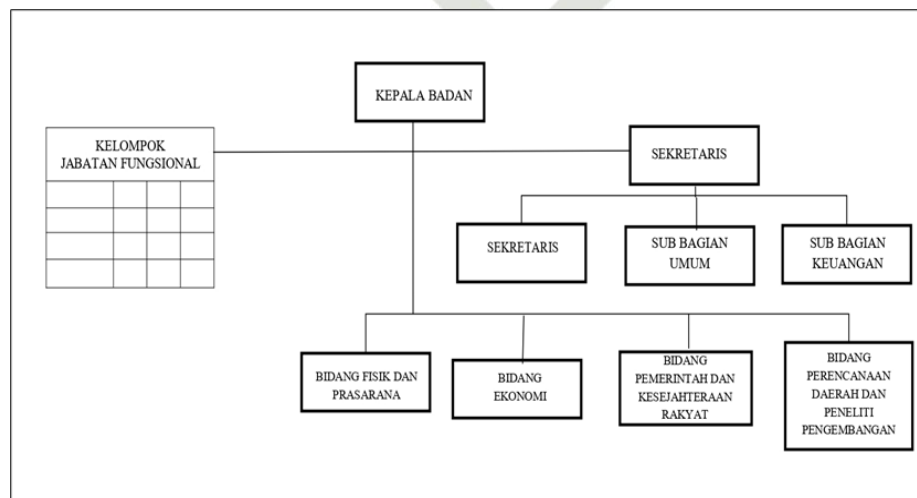
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Sub Bagian Umum, Program dan Keuangan Badan;
- e) Memfasilitasi penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
- f) Menyelenggarakan pelayanan administrasi, keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, umum dan rumah tangga Badan;
- g) Melaksanakan koordinasi pelayanan administrasi Badan;
- h) Mengkoordinasikan rapat Badan dan keprotokolan;
- i) Mengkoordinasikan Laporan Tahunan Badan
- j) Mengkoordinasikan Penyusunan SOP dilingkungan Badan;
- k) Menyelenggaraan Fasilitasi dan asistensi;

4.3 Struktur BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hulu

Adapun susunan mengenai Unit Kerja BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hulu dapat dilihat pada bagan berikut ini.



Gambar 4.2 Bagan Struktur BAPPEDA Indragiri Hulu

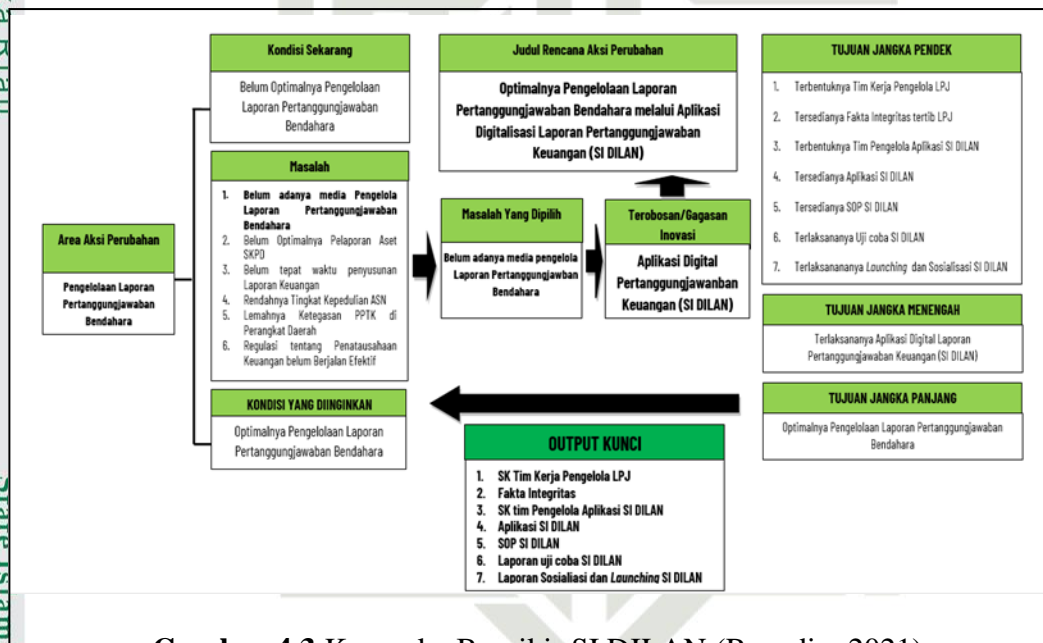
Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hulu didukung oleh 58 Aparatur Sipil Negara dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- A. Kepala Badan
- B. Sekretariat; yang terdiri dari :
 - 1) Sekretaris
 - 2) Sub Bagian Umum
 - 3) Sub Bagian Keuangan
- C. Bidang Fisik & Prasarana, yang terdiri dari :
 - 1) Kepala Bidang
- D. Bidang Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat, yang terdiri dari :
 - 1) Kepala Bidang
- E. Bidang Ekonomi, yang terdiri dari :
 - 1) Kepala Bidang
- F. Bidang Perencanaan Penelitian dan Pengembangan, yang terdiri dari :
 - 1) Kepala Bidang
- G. Kelompok Jabatan Fungsional

4.4 Penggunaan SI DILAN

Aplikasi Digital Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SI DILAN) digunakan di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Indragiri Hulu berawal dari cetusan pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan III di Bukittinggi, Sumatera Barat pada tahun 2021. Pelatihan tersebut diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Regional Bukittinggi. Pengusulan SI DILAN

tersebut dalam rangka pengelolaan laporan pertanggungjawaban bendahara agar berjalan secara optimal, dikarenakan belum adanya media Pengelola Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang dapat mengaarsipkan LPJ secara digital. Selain itu penyusunan proses verifikasi LPJ juga masih dilakukan secara manual sehingga memakan waktu dan tempat. Adapun kerangka berpikir dalam terciptanya SI DILAN yaitu dapat dilihat pada gambar berikut (Rozadin, 2021).



Gambar 4.3 Kerangka Berpikir SI DILAN (Rozadin, 2021)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan *E-Government* dapat diteliti menggunakan lima indikator yaitu Infrastruktur Telekomunikasi, Sumber Daya Manusia (SDM), Ketersediaan Dana dan Anggaran, Perangkat Hukum, dan Penyesuaian Paradigma (Indrajit dkk, 2005). Aplikasi Digital Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SI DILAN) diterapkan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Indragiri Hulu dengan tujuan membantu pengelolaan dan pengarsipan laporan pertanggungjawaban keuangan. Aplikasi tersebut diterapkan pada 5 bidang antara lain Ekonomi, Fisik & Prasarana, Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat, Perencanaan Daerah dan Penelitian Pengembangan, dan Sekretariat.

Secara umum berdasarkan wawancara dan observasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan SI DILAN masih dinilai kurang baik. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek yang belum optimal. Pada aspek infrastruktur telekomunikasi, penyediaan perangkat-perangkat yang ada baik perangkat keras dan perangkat lunak belum memadai. Begitupun dalam ketersediaan jaringan, masih terjadi beberapa permasalahan jaringan yang dirasakan oleh pengguna. Selain itu, Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola dinilai kurang responsif, dimana bendahara belum optimal menjalankan tugas dan fungsinya. Pengelolaan dan pelaporan keuangan masih dibebankan kepada admin per bidang, dimana jumlah sumber daya manusia per bidang juga masih belum memadai yaitu rata-rata hanya dua orang per bidang.

Permasalahan lainnya adalah pengguna masih ada yang kesulitan dalam menjalankan aplikasi, dikarenakan pelatihan hanya dilakukan sekali pada saat aplikasi diluncurkan.

BAPPEDA dinilai belum optimal dalam hal menyediakan dana dan anggaran yang memadai. Anggaran hanya terdiri dari dua pengelolaan yaitu perawatan (*maintenance*) dan penyewaan server. Pelatihan berkala dan subsidi kuota internet untuk pengguna dinilai juga penting untuk dimasukkan dalam anggaran, mengingat bahwa anggaran per tahun SI DILAN relatif tidak besar. Hal ini bertujuan agar pengguna mendapatkan pelatihan berkala sehingga permasalahan kompetensi pengguna dapat teratasi. Selain itu, pengadaan subsidi kuota tersebut untuk membantu pengguna menjalankan aplikasi dimanapun secara fleksibel.

Pemahaman perangkat hukum perlu ditekankan kembali untuk para pengguna. Perangkat hukum berguna untuk memberikan rasa aman kepada pengguna dan instansi pemerintahan. Sementara itu, pada penerapannya paradigma masih pada tahap hanya menyadari pentingnya aplikasi, namun tidak dibarengi dengan sikap dan tindakan yang masih dinilai kurang maksimal. Hal ini terlihat dari seringnya terjadi keterlambatan dalam pengumpulan laporan keuangan melalui SI DILAN. Keterlambatan pelaporan banyak disebabkan kurangnya kebijaksanaan pimpinan dan pengguna dalam menjalankan aplikasi. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa penerapan SI DILAN pada BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hulu masih belum dijalankan dengan baik. Evaluasi, pengembangan, dan kesadaran bersama diperlukan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang optimal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6.2 Saran

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan dan kemudia disimpulkan, penulis menyadari perlu adanya saran- saran terkait guna pengembangan SI
DILAN

kedepannya. Adapun saran mengenai penelitian ini antara lain sebagai berikut.

1. BAPPEDA Indragiri Hulu perlu meningkatkan pengadaan infrastruktur perangkat lunak baik itu komputer, printer dan WIFI agar tidak terjadi permasalahan teknis yang menghambat.
2. Pelatihan dan evaluasi berkala perlu diadakan dan dianggarkan untuk meningkatkan kompetensi pengguna dalam menjalankan tugas.
3. Sanksi keterlambatan perlu diterapkan untuk meningkatkan efisiensi kinerja .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qadhi Abu Abdullah Muhammad, Musnad as-Syihab (Beirut: Muassisaturrisalah, 1985), hal. 108.
- Alshehri, M., Drew, S., (2010). Implementation of e-government: advantages and challenges, in: International Association for Scientific Knowledge (IASK) E-ALT Conference Proceedings. pp. 79–86.
- Amin, M . (1987). *Mengajarkan Ilmu Pengetahuan Alam dengan Menggunakan Metode “Discovery” dan “Inquiry”*. Jakarta: Depdikbud-Dirjen Dikti.
- Anatan, L., dan Lena Ellitan. (2009). *Manajemen Inovasi (Transformasi Menuju Organisasi Kelas Dunia)*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Ansory, A. F dan Indrasari. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi*. Sidoarjo: Indonesia Pustaka .
- Aprianty, D. R. (2016). Penerapan kebijakan e-government dalam peningkatan mutu pelayanan publik di Kantor Kecamatan Sambutan Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(4), 1589-1602.
- Aritonang, D. (2017). The Impact of E-government System on Public Service Quality in Indonesia. *European Scientific Journal*. 13 (35). P. 99-111. Doi: 10.19044/esj.2017.v13n35p99.
- Bahri. (2008). *Konsep dan definisi konseptual*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Bambang, S. (2012). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Cawidu, H. (1991). *Konsep Kufr Dalam al-Qur'an, Suatu Kajian Teologis Dengan Pendekatan Tematik*. Jakarta: Bulan Bintang.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Djojohadikusumo, S. (1994). *Perkembangan Pemikiran Ekonomi : Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan Dan Ekonomi Pembangunan Edisi Pertama*. Jakarta : Pustaka LP3ES.
- Dwiyanto, Agus. (2018). *Realizing Good Governance Through Public Services*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Farida, I., Setiawan, R., Maryatmi, A.S., & Juwita, M.N. (2020). The Implementation of E-Government in the Industrial Revolution Era 4.0 in Indonesia . *International Journal of Progressive Sciences and Technologies*, 22(2), 340-346. ISSN: 2509-0119.
- Gupta, M. P., et al. (2007). A study of information technology effectiveness in
- Hodgetts, R. M. and Kuratko, Donald F. (2007). *Small Business Management*. John Wiley & Sons Inc.
- Hoetoro, A., & Satria, D. (2020). *Smart Economy: Kewirausahaan UMKM 4.0*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Indrajit, R. E., Zainudin, A., & Rudianto, D. (2005). *Electronic Government in Action (Ragam Kasus Implementasi Sukses di Berbagai Belahan Dunia)*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Indrajit, R., E. (2016). *Electronic Government “Strategi Pembangunan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital”*. Yogyakarta: Andi.
- Jawahir Thontowi, “Paradigma Profetik Dalam Pengajaran Dan Penelitian Ilmu Hukum”, *UNISIA*, Vol. XXXIV No. 76 Januari 2012.
- Juliarso, A. (2019). Analisis Implementasi E-Government Dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 10(1), 10-15.
- Kadir, A. (2017). *Pengenalan Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi.
- Kedepatian Bidang Inovasi Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara. (2017). *Pengukuran Indeks Persepsi Inovasi Pelayanan Publik (PINPEL)*. Jakarta: Pusat Inovasi Pelayanan Publik Lembaga Administrasi Negara.
- Khaira, A., & Ariusni, A. (2020). Analisis Kausalitas Infrastruktur Telekomunikasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 2(1), 17-20.
- Lubis, A. Y. (2014). *Filsafat Ilmu: Klasik hingga Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Majeed, M. T, and Tayba Ayub. (2018) Information and communication technology (ICT) and economic growth nexus: A comparative global Analysis. *Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences* Vol. 12 (2), 2018: 443-476.
- Makmur dan Thahier, R. (2015). *Inovasi dan Kreativitas Manusia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Mankiw, N. (2003). Pengantar Ekonomi (Haris Munandar, Penerjemah). Jakarta: Erlangga.
- Masyhuri dan M. Zainuddin. (2008). *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi, Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Milles dan Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Nurkholis, A., Riyantomo, A., & Tafrikan, M. (2017). Sistem Pakar Penyakit Lambung Menggunakan Metode Forward Chaining. *Momentum*, 13(1), 32–38. <https://doi.org/10.36499/jim.v13i1.1757>
- Pratama, A.E. (2014). *Sistem Informasi dan Implementasinya*. Bandung: Informatika Bandung.
- Purwanto. (2007). *Instrumen Penelitian Sosial dan Pendidikan Pengembangan dan Pemanfaatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI . (1994). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahmah, S. U., & Ranu, M. E. (2015). Efektivitas Kerja Pegawai Dalam Menerapkan E-Office Untuk Mendukung E-Government Dalam Kegiatan Korespondensi Kedinasan Di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya. *Jurnal Universitas Negeri Surabaya*, 20.
- Ramadhan, A. D. (2020) Pengaruh Inovasi Kepegawaian Berbasis Aplikasi Mobile Si-Cakep Terhadap Efektivitas Pelayanan. *Skripsi*. Makassar : Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Retnowati, N.D., & Daru Retnowati.(2008). “Peranan E-Government Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance Bagi Masyarakat”. *In Seminar Nasional Informatika*, hlm. 210. Yogyakarta: UPN Veteran.
- Rihandoyo, O. (2015). Pembangunan E Gov Sebagai Basis Keunggulan Dalam Menghadapi Era Masyarakat Ekonomi Asean (Mea)(Studi Pengembangan Egov Kota Semarang). *Program Studi Doktor Administrasi Publik FISIP-UNDIP*, 109.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Riyanto, A. (2017). Pemahaman Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 42(3), 381-409.
- Sandiasa, G., & Agustana, P. (2018). Reformasi Administrasi dan Birokrasi Pemerintahan Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Publik di Daerah. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 3(1), 1-8.
- Setiawan, R. (2016). Peranan Etika Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandar Lampung. *Jurnal e-JKPP*. Vol. 2 (2).
- Sinurat, H. P., & Sumanti, R. R. (2020). Tantangan Penerapan Inovasi di Kota Sabang. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 15(1), 39-49.
- Soedjadi. (2000). *Kiat Pendidikan Matematika di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
- Sosiawan, E. A. (2015, June). Tantangan dan Hambatan dalam implementasi E-Government di Indonesia. In *Seminar Nasional Informatika (SEMNASIF)* (Vol. 1, No. 5).
- Stamm, B.V. (2008). *Managing innovation, design and creativity (2nd ed)*. Chichester: John Wiley & Sons Ltd.
- Sudarto. (2010). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: P.T. ALUMNI.
- Sugiyono, S. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono, S. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sukamto & Shalahuddin. (2018). *Rekayasa Perangkat Lunak*. Bandung: Informatika.
- Surah Ar-Rad Ayat 11. Tafsir Fi Zilalil Qur'an, Sayyid Qutb.
- Susanto, A.B., R.Masri Sareb Putra. (2010). *60 Management Gems*. Jakarta: Gramedia.
- Trott, P. (2008). *Innovation management and new product development (4th ed)*. England: Pearson Education.
- Valle-Cruz, D. (2019). Public Value of E-government Service Through Emerging Technologies. *International Journal of Public Sector Management*. 32 (5). P.530-545. Doi: 10.1108/IJPSM-03-20180072.

- ©Wahyuni, S. (2020). Pengaruh Penerapan E-Kinerja Dan Integritas Terhadap Kinerja Pegawai. *JESS (Journal of Education on Social Science)*, 4(2), 153. <https://doi.org/10.24036/jess.v4i2.290>
- Williams dan Sawyer. (2003). *Using Information Technology: A Practical Introduction to Computers and Communications*. London: Career Education.
- Wirawan, V. (2020). Penerapan E-Government dalam Menyongsong Era Revolusi Industri 4.0 Kontemporer di Indonesia. *Jurnal Penegakkan Hukum dan Keadilan*, 1(11), 1-16.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

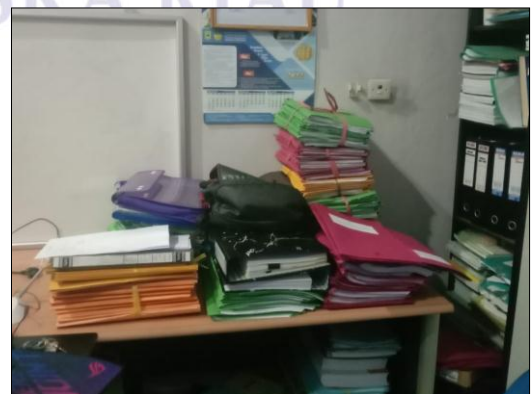


- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN I

DOKUMENTASI

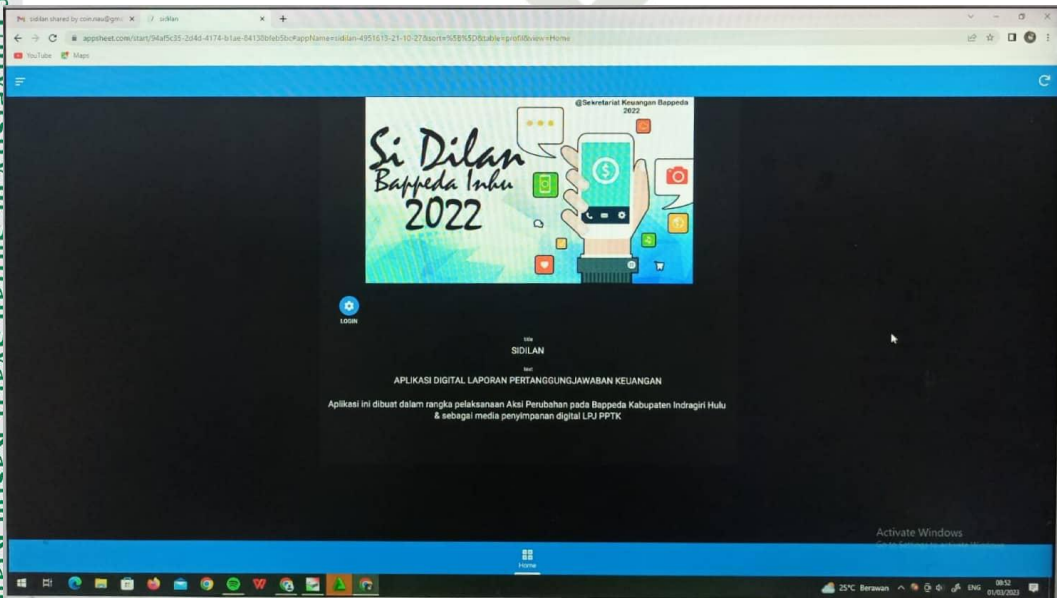
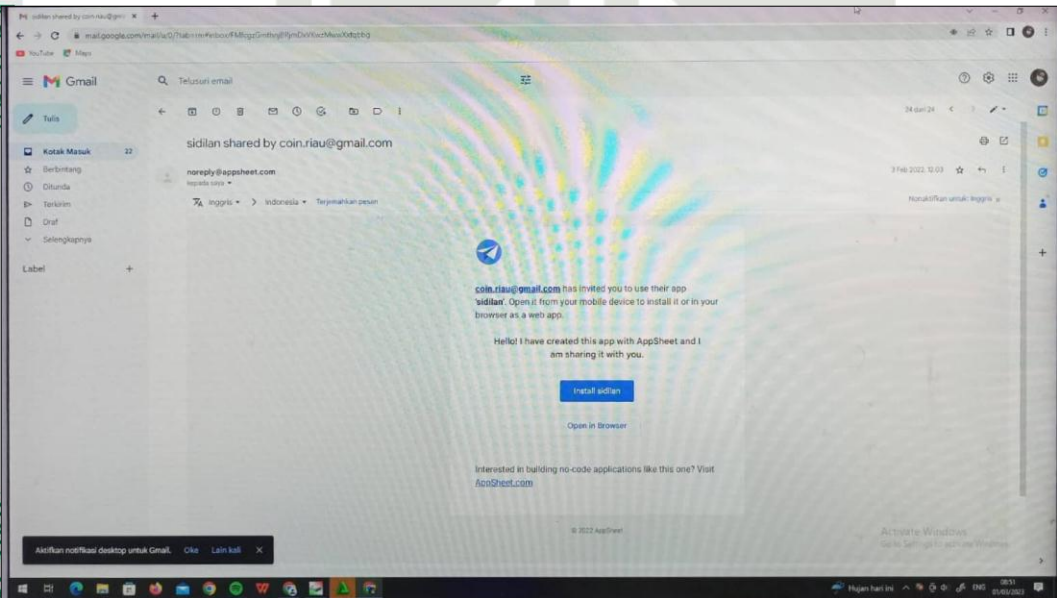
Berikut beberapa dokumentasi wawancara dan observasi mengenai penerapan SI DILAN di Kantor BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hulu, antara lain sebagai berikut.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

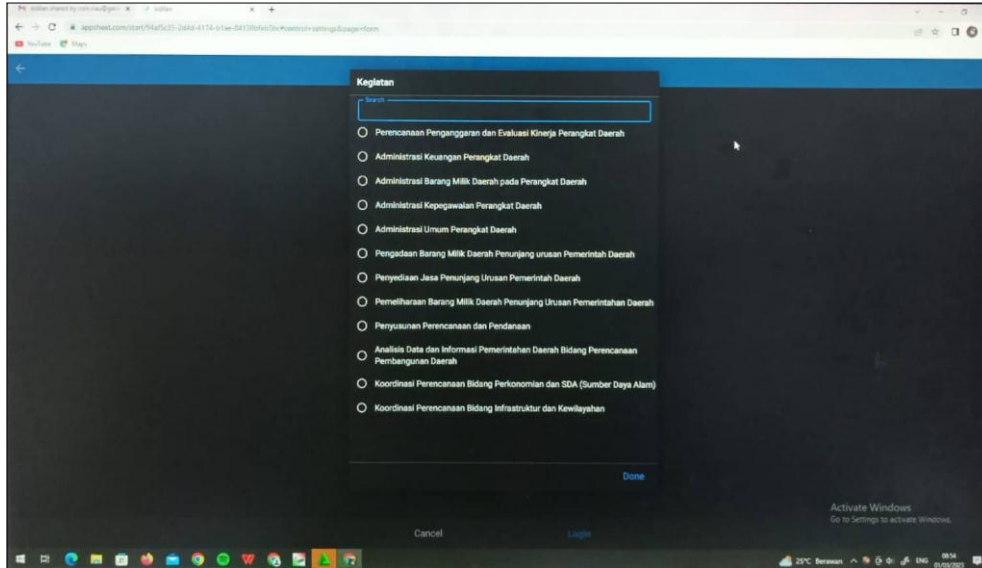
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



nama_subkegiatan	Total Belanja	tahun	bulan	sort
Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan perundang undangan	4.000.000	2022	Februari	>
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.006.000	2022	Februari	>
Penyediaan Barang takban dan Penggantian	8.905.500	2022	Februari	>
Penyediaan Barang takban dan Penggantian	4.000.000	2022	Februari	>

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUNAAN SI DILAN (APLIKASI DIGITAL LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN)

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		PPTK	Admin Bidang	PPK SKPD	Pengguna Anggaran	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Melakukan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	●				Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	10 Hari	Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
2	Melakukan Scanning Laporan Pertanggungjawaban Keuangan		■			Dokumen LPJ	5 Hari	File Pdf LPJ
3	Melakukan Entri data Laporan Pertanggungjawaban Keuangan pada Aplikasi SI DILAN		■			PDF	5 Hari	Arsip Digital LPJ
4	Melakukan Verifikasi Laporan pertanggungjawaban Keuangan			◆		Arsip Digital LPJ	1 Hari	Dokumen verifikasi
5	Menyetujui Pengesahan Laporan pertanggungjawaban Keuangan				●	Arsip Digital LPJ	1 Hari	Dokumen Pengesahan

UIN SUSKA RIAU



© Hak cipta

LAMPIRAN II SURAT-SURAT PENDUKUNG PENELITIAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Soeharto No. 35 Km. 15 Tuahmalut Tarzan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562952 Web: www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekosos@uin-suska.ac.id

Nomor	Ua.04/F.VII/PP.00.9/6197/2022	Pekanbaru, 05 Desember 2022 M
Sifat	Biasa	11 Jumadil Awwal 1444 H
Lampiran	-	
Hal	Izin Riset	

Kepada
 Yth. Kepala Kantor
 Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Riau
 di Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Nama	Fairus Wafiq Anjelica
NIM	11970523462
Jurusan	Administrasi Negara
Semester	VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: "Penerapan SI DILAN (Aplikasi Digital Laporan Pertanggungjawaban Keuangan) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Indragiri Hulu" Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Dekan,



Dr. Kamaluddin, S. Sos, M. Si
 SHP 15790101 200710 1 003



- Hal 1
1. Hal
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Lintas Timur Km. 05 Pematang Reba Telp. (0769) 341609, Fax. (0769) 341211
 Email. info@dpmptsp.inhukab.go.id Website. dpmptsp.inhukab.go.id

RENGAT

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
 NOMOR : 206/DPMTSP/NON IZIN-SKP/XI/2022

MEMBACA : Permohonan Surat Keterangan Penelitian (SKP) Nomor - tanggal 25 November 2022 perihal permohonan Surat Keterangan Penelitian;

MENIMBANG : Surat Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi Nomor 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/51557 tanggal 09 November 2022;

MENINGGAT : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;

2. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Layanan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hulu memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

1. Nama	FAIRUS WAFIQ ANJELICA
2. Nomor Induk Mahasiswa	11970523462
3. Alamat	JL. P. REBA - P. HERAN RT/RW 004/006 KEL. PEMATANG REBA KEC. RENGAT BARAT - KAB. INDRAGIRI HULU INDONESIA
4. Kebangsaan	INDONESIA

Melakukan penelitian dalam rangka penyusunan karya ilmiah (Disertasi / tesis / skripsi / tugas akhir) dengan rincian sebagai berikut :

1. Judul Penelitian	PENERAPAN SI DILAN (APLIKASI DIGITAL LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN) PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN INDRAGIRI HULU
2. Lokasi Penelitian	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KAB. INDRAGIRI HULU
3. Lama Penelitian	6 (ENAM) BULAN
4. Status Peneliti	MAHASISWA
5. Nama Lembaga	UIN SUSKA RIAU

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dalam ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada pejabat setempat/lembaga swasta yang akan dijadikan objek lokasi penelitian.
3. Melaksanakan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintah.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Rengat
 Pada tanggal : 25 November 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN INDRAGIRI HULU,



ENDANG MULYAWAN, S.Hut., M.Si
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19721011 199903 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Indragiri Hulu;
2. UIN SUSKA RIAU;
3. Arsip.



2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak C
1. Di
a. 1
b. 1

© H



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl.Lintas Timur Pematang Reba – Rengat Telp. (0769) 341094 – 341025 Fax. (0769) 341215
 Website : www.bappedalitbang.inhukab.go.id Email : sekre.bappedalitbang@gmail.com

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 050/Bappeda-SK/15

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MELKI CHANDRA, S.Sos
 NIP : 198604072011021002
 Jabatan : Kasubbag. Umum Bappeda Kab. Inhu

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Fairus Wafiq Anjelica
 NIK : 11970523462
 Fakultas : Ekonomi dan Sosial Universitas UIN Suska Riau
 Jurusan : Administrasi Negara
 Jenjang : S1
 Alamat : Jalan Srikandi Pekanbaru

Telah melakukan kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tanggal 20 Februari s/d 22 Februari 2023 dengan judul :

“ Penerapan Si Dilan (Aplikasi Digital Laporan Pertanggungjawaban Keuangan) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu ”

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pematang Reba, 24 Februari 2023
 a.n KEPALA BAPPEDA KAB. INHU
 Sekretaris,
 Ub,
 Kasubbag. Umum,



MELKI CHANDRA, S.Sos
 PENATA III/c
 NIP. 198604072011021002



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISSET/52573
T E N T A N G



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/6197/2022 Tanggal 5 Desember 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

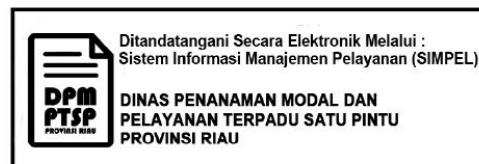
- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | FAIRUS WAFIQ ANJELICA |
| 2. NIM / KTP | : | 11970523462 |
| 3. Program Studi | : | ADMINISTRASI NEGARA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PENERAPAN SI DILAN (APLIKASI DIGITAL LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN) PADA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN INDRAGIRI HULU |
| 7. Lokasi Penelitian | : | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN
INDRAGIRI HULU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 21 Desember 2022



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hulu
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Rengat
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Fairus Wafiq Anjelica atau biasa disapa Fai, lahir di Indragiri Hulu pada tanggal 26 Juli 2000. Anak pertama dari pasangan Ayahanda Faisallahuddin & Ibunda Patmawati, S.Pd serta memiliki dua orang adik yaitu M. Fathir Rahman & Aisyah Ramadhani. Selama hidup, penulis telah menyelesaikan beberapa pendidikan di beberapa sekolah yaitu SDN 005 Pekan Heran, MTs N Pekan Heran, dan SMA N 1 Rengat Barat. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan pada tahun 2019 ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada Program Studi S-1 Ilmu Administrasi Negara. Pada tahun 2021, penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Indragiri Hulu. Kemudian pada tahun 2022, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Seberida, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu sebagai wujud pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Penulis menyelesaikan studi dengan mengikuti Ujian Munaqasah pada tanggal 16 Juni 2023 dengan judul skripsi ***“Penerapan Aplikasi Digital Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SI DILAN) Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Indragiri Hulu”***, sehingga dinyatakan lulus dan berhak menyanggah gelar Sarjana Sosial (S. Sos).